

Laporan Tahunan 2024

TUMBUH TANGGUH BERDAYA

Yayasan Tifa

YAYASAN
TIFA



Prolog

Tumbuh, Tangguh, Berdaya



“ Di mana orang ditindas, di situ lahirlah kewajiban moral untuk melawan. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya, ia harus diperjuangkan.”

Franz Magnis-Suseno

Filsuf, Penulis, dan Imam Katolik

Dalam perjalanan gerakan masyarakat sipil yang terus tumbuh, wajah dunia terus berubah. Ketimpangan masih menjadi ancaman, pembungkaman masih terus menjadi tuan bagi kekuasaan yang enggan berkawan karib dengan keadilan. Tahun 2024 menjadi saksi sejarah konstelasi pesta demokrasi di Indonesia kelima sejak reformasi. Pemilu yang dalam proses dan hasilnya masih dipenuhi berbagai sengkabut tantangan bagi nafas demokrasi dan perjuangan kesetaraan. Dalam momen itulah, **Yayasan Tifa** mengambil peran-peran pentingnya dalam merawat dan mengkritik bagaimana demokrasi dijalankan, sekaligus tetap menempuh napak-napak tilas kerja akar rumput bersama mereka yang direntankan dan dipinggirkan oleh sistem.

Pada 2024 pula, Tifa terus berdiri di tengah arus global yang mengombak kuat, di mana tantangan geopolitik menderu dan menghimpit ruang gerak masyarakat sipil. Tifa dihadapkan pada kenyataan bahwa otoritarianisme semakin menguat, mengepung banyak negara, termasuk Indonesia. Arus dukungan global juga terus menyempit, dan narasi kebencian dan penggembosan terhadap keadilan juga terus menguat. Di tengah pusaran ini, mereka yang mengusung nilai-nilai keadilan dan kebebasan kerap ditekan ke pinggir. Namun, sebagaimana sejarah selalu membuktikannya, gerakan yang lahir dari rakyat—sebuah api kecil yang menyala dalam kegelapan—tak akan pernah padam.

Tifa bukanlah lembaga yang diam, yang menunggu angin berlalu. Tifa hadir dengan kerja-kerja yang berpijak pada masyarakat—dari kampung-kampung yang jauh, hingga urusan kebijakan negara yang perlu terus dikawal dan didukung perbaikannya. Dengan kemitraan yang terus tumbuh bersama berbagai elemen

masyarakat sipil, Tifa memanfaatkan setiap peluang untuk membangun kapasitas, memperjuangkan keadilan, dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu tetap terjaga, menjadikan masyarakat dan negara tetap terbuka dan akuntabel.

Setiap langkah yang diambil Tifa adalah wujud dari tekad untuk terus menghidupi nilai-nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, perlindungan terhadap yang rentan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Bukan saja sebagai organisasi yang bergerak di jalur kebijakan dan advokasi, Tifa juga bergerak dan bekerja untuk menyentuh langsung kehidupan masyarakat, memperkuat kesadaran bersama bahwa kekuatan besar kita terletak pada ruang-ruang solidaritas dan kerja-kerja kolektif.



Pelatihan Hukum Kritis untuk Masyarakat Adat To
Cerekang, Sulawesi

Yayasan Tifa & Perkumpulan Wallacea © 2024

Dalam laporan tahunan ini, Tifa mengabarkan perjalanan kerja di tahun 2024 yang tidak hanya mencatatkan pencapaian, tetapi juga menggambarkan daya tahan, daya lenting, dan cerita-cerita ketangguhan. Tifa percaya bahwa meski dunia penuh dengan ketidakpastian, semangat untuk tumbuh, untuk tetap tangguh, dan untuk memberdayakan akan terus menyala.

Tahun 2024 adalah rekaman realitas kolektif, bahwa meskipun tantangan terhimpitnya ruang-ruang sipil terus mencoba menekan, namun semangat Tifa untuk merawat perubahan tidak pudar. Yayasan Tifa, bersama masyarakat sipil di Indonesia, terus berjuang untuk ruang-ruang demokrasi yang terus menyala, lingkungan hidup yang lestari, tata kelola kebijakan data yang aman dan bertanggung jawab, serta kehidupan keberagaman yang lebih setara, adil, dan berdaya.



Daftar Isi

Laporan Tahunan Yayasan Tifa 2024

Prolog	2
Daftar Isi	4
Sekapur Sirih dari Direktur	6
Pengantar dari Dewan Pembina	8

Tentang Tifa: Sejarah, Arah, Peran, dan Pendekatan	10
Program dan Peran Strategis Tifa	12
Tifa dan Masyarakat Terbuka	14
Mereka yang Bergerak di Balik Layar	15

Jejak Langkah 2024: Ringkasan Eksekutif	17
Lini Masa Kerja-kerja Tifa	21
Sorotan bersama Mitra	24
Suara-Suara dalam Data dan Angka	31



Suluh Resiliensi	36
Jurnalisme Aman	37
Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI)	39
Demokrasi Digital	42
Keadilan Transisional	44
Pelindungan Data Pribadi	46
Membangun Ketahanan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	50



Kolase Program-Program Yayasan Tifa selama 2024
Yayasan Tifa © 2024

Cerita-Cerita dari Pinggiran	53
Bicara Karya	56
Bersuara dari Layar Media Sosial	61
Metamorfosa Tifa	62
Laporan Keuangan	64
Glosarium	69

Tampilan Modul “Netizen juga Citizen: Menyemarakkan Aktivisme Digital”
Yayasan Tifa © 2024



Sekapur Sirih dari Direktur

Oslan Purba

Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi masyarakat sipil di Indonesia. Di tengah gejolak politik dan ancaman krisis ekonomi yang terus meningkat, serta ruang bagi kebebasan sipil yang semakin sempit—yang kerap disertai dengan sikap represif negara terhadap kebebasan berpendapat, menuntut kita untuk terus berjaga, saling jaga, dan berdiri tangguh untuk mempertahankan hak-hak dasar kita.

Yayasan Tifa mengakui pentingnya perjuangan untuk kebebasan pers dan keselamatan jurnalis, termasuk media yang independen. Di tahun 2024, kami mengambil peran aktif dalam mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran, memperjuangkan hak-hak jurnalis melalui Koalisi Keamanan Jurnalis dan Jurnalisme Aman, serta mendukung upaya kolektif dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat.

Selain itu, Tifa juga terus setia mendorong dan menyuarakan perlindungan bagi masyarakat adat, yang semakin terancam dengan maraknya praktik eksploitasi oleh industri ekstraktif. Di berbagai penjuru Indonesia, masyarakat adat menghadapi ancaman yang tidak saja berupa perampasan lahan, tetapi juga atas ruang hidup mereka yang semakin tergerus oleh pencemaran lingkungan. Dari Maluku hingga Bengkulu, Tifa berusaha mendorong lahirnya model-model pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan dan perlindungan ekosistem melalui inisiatif lokal yang memberi ruang bagi rakyat untuk memimpin advokasi.

Pekerjaan Tifa di tahun 2024 memang tampak tersebar di berbagai bidang, namun semuanya memiliki satu benang merah yang jelas: membangun resistensi dan resiliensi masyarakat. Kami melihat bahwa inisiatif-inisiatif kecil yang ditumbuhkan nyatanya dapat menghadirkan dampak yang luas.



Keramba apung di Maluku, peraturan desa yang ramah lingkungan di Indramayu, serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Bengkulu, adalah contoh nyata bagaimana solidaritas kolektif yang Tifa tumbuhkan bisa melahirkan kebijakan dan ruang pemberdayaan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, kami juga tidak melupakan komitmen untuk mengadvokasi pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun upaya untuk memberikan keadilan bagi mereka masih terbentur pada kebijakan yang tidak jelas dan hambatan politik, Tifa terus berjuang agar suara mereka tidak hilang dalam arus sejarah. Kami tetap berkomitmen mendukung Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) meski menghadapi ancaman penghapusan, serta memastikan bahwa keadilan bagi korban pelanggaran HAM tetap menjadi prioritas bagi kita semua. Akhirnya, keberadaan Tifa sebagai lembaga independen di tengah perubahan lanskap filantropi global juga mencerminkan daya lenting dan ketahanan yang kami bangun. Kami berusaha menjadi lembaga *intermediary* yang harapannya dapat menginspirasi dan mendorong organisasi lain untuk tetap bertahan dalam ketangguhan, terutama dalam tata kelola organisasi dan *financial resilience* dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Kami ingin memberikan teladan bagaimana lembaga masyarakat sipil dapat terus bertumbuh dan berdaya meski dalam tekanan yang semakin besar.

Melalui Laporan Tahunan ini, kami ingin mengajak seluruh masyarakat, mitra, dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama merenungkan perjalanan yang telah kami tempuh, serta menggugah semangat kolektif kita untuk terus memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan pers, perlindungan terhadap alam dan lingkungan, dan keadilan sosial. Dan bahwa betapa pun tantangan dari berbagai arah terus berupaya meminggirkan kita ke sudut, namun semangat solidaritas kita adalah lembaran yang harus kita tulis demi lembaran-lembaran langkah perjuangan kita selanjutnya.

Oslan Purba

Direktur Eksekutif
Yayasan Tifa

Penabuh Tifa dalam Suling Tambur
di Kepulauan Raja Ampat, Papua
Keenan63/CC BY 4.0 (2018)



Pengantar dari Dewan Pembina

Felia Salim

Demokrasi akan selalu luput bila tidak terus dikawal.

Inilah tugas yang senantiasa diemban oleh **Yayasan Tifa** selama lebih dari dua dekade terakhir. Seolah baru kemarin Reformasi 1998 tergapai dengan penuh harapan dan tuntutan masyarakat—hapus korupsi, tegakkan keadilan, dan wujudkan pemerintahan terbuka yang berpihak pada rakyat. Namun, kenyataannya kini kita justru dihadapkan kembali pada tekanan-tekanan serupa yang pernah melanda negeri ini. Sejumlah capaian Reformasi mulai terkikis. Pilar-pilar demokrasi yang dahulu dibangun secara intensif oleh gerakan masyarakat sipil, akademisi, media, dan elemen-elemen hukum kini menghadapi tantangan baru—mulai dari pelemahan institusi-institusi kunci seperti KPK dan KPU, proses legislasi yang makin tertutup dari partisipasi publik, hingga meningkatnya kesenjangan sosial-ekonomi dan kriminalisasi terhadap pembela HAM.



Tantangan tersebut belum termasuk disrupsi global yang turut menambah kerentanan: transformasi teknologi yang berkembang pesat dan krisis iklim yang mengancam kehidupan komunitas rentan. Semua ini menuntut respons kolektif dan pengawalan yang terus-menerus.

Dalam situasi ini, Tifa hadir sebagai lembaga lokal independen yang berpijak pada perspektif hak asasi manusia dan prinsip keterbukaan informasi yang akuntabel. Sejak berpisah dari Open Society Foundations pada 2019, Tifa terus mengonsolidasikan diri dengan memperkuat tata kelola internal, menjalin kemitraan strategis, serta merancang program-program yang responsif terhadap tantangan zaman.

Kerja-kerja Tifa mencakup, namun tidak terbatas pada:

- **Menguatkan peran dan posisi masyarakat sipil** sebagai aktor utama demokrasi,
- **Mendorong keadilan transisional atas pelanggaran HAM**, melalui reparasi bagi korban, pengungkapan kebenaran, dan dukungan terhadap KKR di Aceh dan Papua.
- **Mengadvokasi kebebasan pers dan perlindungan jurnalis**, terutama dalam

momen krusial seperti Pemilu 2024,

- **Menjadi sekretariat Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI)** dan mengelola Dana Responsif untuk mendukung aktivis yang menghadapi ancaman, kriminalisasi, atau perebutan ruang hidup, dan
- **Merancang program-program strategis bersama mitra dan koalisi**, baik di tingkat nasional maupun regional.

Tifa menyadari bahwa sumber daya akan selalu menjadi tantangan. Namun, modal sosial yang dimiliki—pengalaman panjang, jejaring luas, reputasi kredibel, dan dedikasi jajaran pengurus serta tim pelaksana—menjadi kekuatan utama kami.

Sebagai organisasi lokal sejak awal berdirinya, Yayasan Tifa menjunjung tinggi independensi lembaga, tanpa menutup diri terhadap kolaborasi yang selaras dengan nilai dan prinsip kami.

Sebagai Dewan Pembina, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra, donor, aktivis, pengurus, dan komunitas yang selama ini berjalan bersama kami. Perjalanan ini tentu belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah Reformasi yang harus diselesaikan. Untuk itu, mari terus bersolidaritas, memperkuat demokrasi, dan memperjuangkan keadilan sosial demi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan bermartabat.

Felia Salim

Dewan Pembina

Yayasan Tifa

Rombongan mahasiswa saat memasuki halaman DPR/MPR pada 19 Mei 1998
Historia.id



Tentang Tifa

Sejarah, Arah, Peran, dan Pendekatan



Manakala keran demokrasi terbuka sejak era reformasi tahun 1998, euforia gerakan masyarakat sipil pun tak terbendung dan merayakannya dengan gegap gempita. Berbagai organisasi, komunitas, dan lembaga sosial ambil bagian dalam mendorong penguatan demokrasi, yang betapa pun terus menemu gelombang tantangannya hingga hari ini, menaruh komitmen dan harapan besar untuk mewarnai laju gerak reformasi, demokrasi, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Tanggal 8 Desember tahun 2000 ialah awal mula jejak baru bagi **Yayasan Tifa**— sebuah lembaga sosial masyarakat yang kini usianya lebih dari dua dekade. Usia yang melampaui matang untuk tumbuh dan terus bergerak melanjutkan perjalanan dalam kerja-kerja demokrasi, kemanusiaan, dan keadilan di Indonesia. Dibentuk oleh para punggawa gerakan masyarakat sipil—Hadi Soesastro, Felia Salim, (alm) Daniel Dhakidae, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohamad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Mariyah, dan Smita Notosusanto, nama dan lembaga 'Tifa' pun lahir, disari dari spirit alat musik serupa gendang asal Timur Indonesia, untuk menggambarkan komitmen dan perjuangan panjang menyuarakan perlindungan HAM dan keadilan, terutama bagi mereka yang dipinggirkan oleh sistem dan ketimpangan.

Sejak mula sejarah lahirnya, Tifa dirawat dan tumbuh sebagai organisasi yang berkomitmen penuh dan mengambil peran penting untuk menyuarakan dan mengupayakan masyarakat yang terbuka dan adil, utamanya melalui dukungan penuh terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, media yang bebas, advokasi terhadap hak-hak kelompok rentan, perlindungan terhadap alam dan lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan publik.

Jejak kerja-kerja Tifa bisa ditemukan di hampir seluruh provinsi di Indonesia, lantaran komitmen teguh Tifa untuk kebersamai dan mengadvokasi berbagai isu-isu penting, baik dalam skala nasional maupun daerah, yang terbentang di berbagai titik, sektor, inisiatif, dan kebijakan: dari soal penyelesaian Konflik Aceh, terorisme, tata pemerintahan, bantuan hukum, UU Penyiaran, UU Yayasan, UU Buruh Migran, kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik, demokrasi, dan kebijakan publik, hak-hak disabilitas, penguatan narasi dan representasi suara Papua, perlindungan terhadap minoritas gender dan seksualitas, lintas iman, pemantauan proses pemilu, agraria, kekerasan negara dan agama, lingkungan dan alam, penguatan gerakan anti korupsi, masyarakat adat, hak-hak reparasi korban pelanggaran HAM, perlindungan data dan informasi pribadi, perlindungan terhadap kelompok rentan, hak atas air, penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan, jurnalisme aman, hingga pemberdayaan dan tata kelola di tingkat desa.

Dua puluh empat tahun sejak Tifa lahir meramaikan gerakan sipil di Indonesia. Di tengah situasi sosial dan politik yang saat ini menguji warisan reformasi, Tifa setia meneruskan perjuangan menyuarkan keadilan dan kesetaraan: hak-hak setiap orang mesti dinikmati tanpa terkecuali, dan demokrasi sejati dihidupi manakala tak ada satu pun identitas, individu, maupun komunitas dalam masyarakat kita yang disisihkan, dipinggirkan, dan direntankan untuk mengambil perannya sebagai bagian utuh dari Indonesia.

Visi:

Terwujudnya **masyarakat terbuka** yang berkhidmat kepada **kebhinekaan, kesetaraan, dan keadilan**.

Misi:

- 1 Menjaga iklim demokrasi yang memastikan **kebebasan sipil** termasuk dalam ranah digital dan terpenuhinya **Hak Asasi Manusia (HAM)**.
- 2 Mendorong **tata kelola yang baik** di sektor pemerintah, korporasi, dan organisasi masyarakat sipil.
- 3 **Memperkuat sumber daya** masyarakat sipil untuk membangun **sinergi** dan **partisipasi** berbasis pengetahuan dalam pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
- 4 Mendorong upaya **perlindungan wilayah** kelola rakyat dan **penanganan iklim** yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
- 5 Meningkatkan **kolaborasi multipihak yang konstruktif** dalam pembangunan demokrasi dan HAM, manajemen Sumber Daya Alam (SDA) dan Perubahan Iklim, serta tata kelola data digital.

Nilai

Pada tahun 2016, **Yayasan Tifa** merumuskan ulang visi organisasi yang kemudian diturunkan ke dalam empat nilai yang hingga kini masih menjadi landasan pelaksanaan program yang dipegang teguh oleh Yayasan Tifa. **Keempat nilai tersebut adalah:**

Nilai Utama:



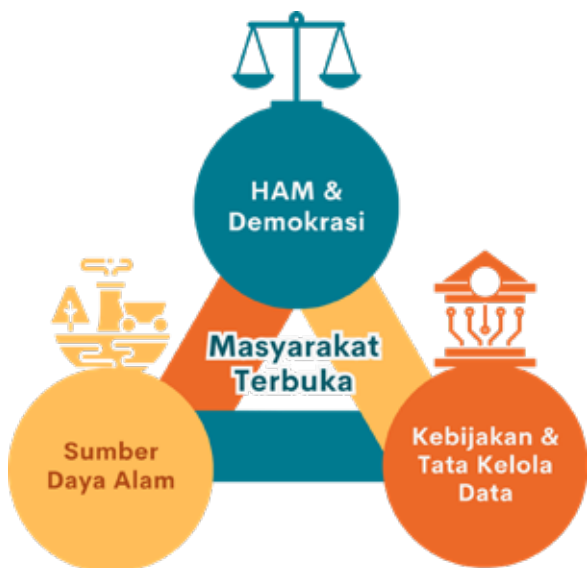
Melalui empat nilai ini, Tifa meneguhkan komitmennya untuk membangun masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan, menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekayaan bangsa, mendorong kesetaraan dalam hak dan kesempatan bagi setiap individu tanpa diskriminasi, serta memperjuangkan keadilan sosial yang merata dan berkelanjutan. Dalam setiap langkahnya, Tifa berupaya menjadi ruang aman dan partisipatif bagi berbagai kelompok, terutama mereka yang terpinggirkan, dengan mendorong kebijakan publik yang inklusif dan praktik demokrasi yang partisipatif. Pendekatan ini bukan semata mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang progresif, tetapi juga sekaligus merawat nilai-nilai kemanusiaan yang dihidmati seutuhnya, sehingga perubahan sosial yang diperjuangkan berakar pada kekuatan kolektif masyarakat sipil yang terus terbangun solidaritasnya, terasah empatinya, dan diperkuat kesadarannya tentang keterbukaan dan penghormatan terhadap identitas setiap orang tanpa terkecuali.

Program dan Peran Strategis Tifa

Yayasan Tifa mendasarkan kerja-kerjanya secara strategis dalam lima dampak luaran atau *outcome* yang hendak dicapai, serta melalui segitiga pendekatan.

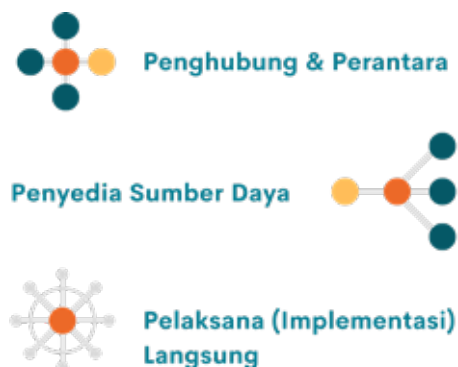
Dampak luaran yang hendak dicapai Tifa:

1. Menguatnya gerakan masyarakat sipil dalam menyuarakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta melawan segala bentuk ketidakadilan dan otoritarianisme.
2. Meningkatnya akses dan kontrol masyarakat adat/lokal terhadap pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.
3. Menguatnya akuntabilitas sosial dan partisipasi publik yang bermakna dalam pelebagaan demokrasi.
4. Meningkatnya praktik tata kelola data digital yang efektif
5. Masyarakat sipil semakin efektif dan akuntabel dalam mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka dan demokratis.



Segitiga pendekatan ini menjadi tumpuan kerja-kerja Tifa dalam merumuskan setiap program, melibatkan diri dalam koalisi-koalisi bersama mitra dan masyarakat sipil secara luas, serta dalam memastikan bahwa kerja dan dampak kerja Tifa dapat menyentuh irisan interseksionalitas dalam mendorong dan mengadvokasi keadilan manusia, keadilan iklim (*climate justice*), dan tata kelola digital yang inklusif.

Berkembang dari organisasi pemberi hibah, Tifa kini menghubungkan organisasi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, dan publik untuk mendorong perubahan yang lebih bermakna. Selain berperan sebagai perantara, Tifa juga menjalankan inisiatifnya sendiri untuk menangani isu-isu strategis di atas.



Tifa dan Masyarakat Terbuka

Selama lebih dari dua dekade, sejak awal berdiri, **Yayasan Tifa** merupakan salah satu jejaring penting dari Open Society Foundations—jaringan hibah global yang memimpikan masyarakat dunia yang adil, demokratis, dan terbuka. **Namun, tahun 2019 menandai babak baru bagi Tifa yang kini melengang sebagai lembaga yang mandiri**, tumbuh mengelola kelembagaan yang lebih berdikari, mapan, dan terus memperbaiki diri dalam tata kelola yang berkelanjutan, tanpa kehilangan komitmen dan ketangguhannya untuk mengambil peran penting dalam kerja-kerja demokrasi dan HAM.

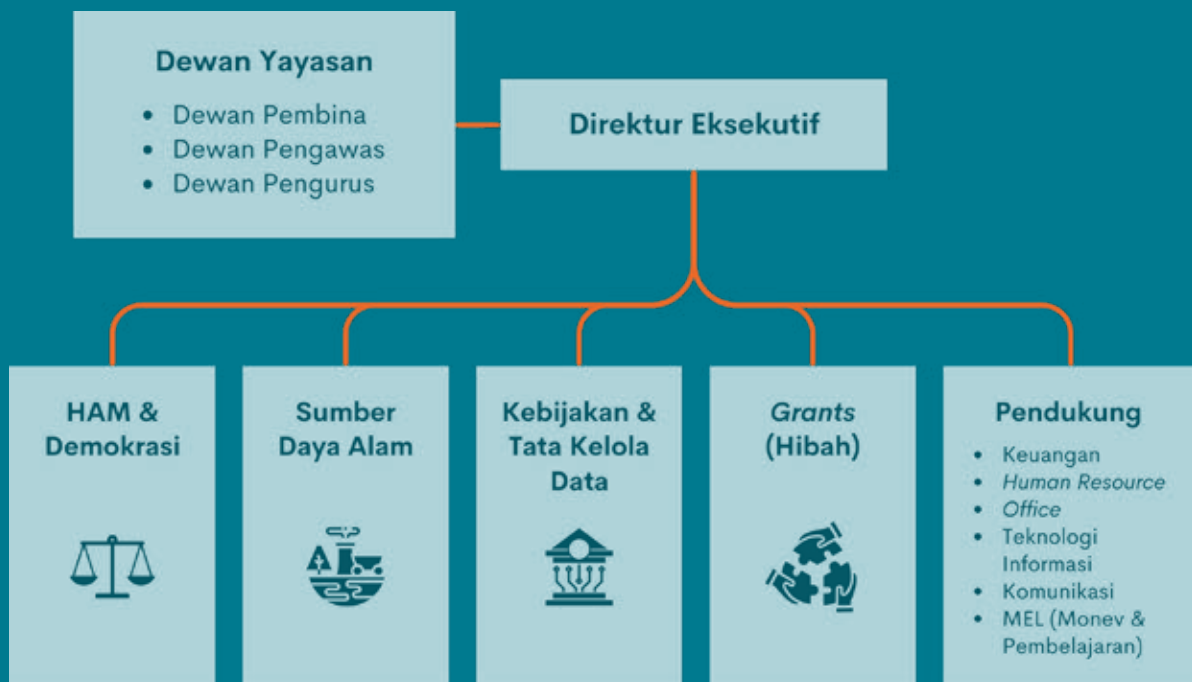


Mengakar dari pendekatan **Masyarakat Terbuka** atau **open society** yang ditelurkan oleh Karl Popper—seorang pemikir dan filsuf terkemuka berdarah Austria-Inggris, Tifa mendasarkan kerja-kerjanya dalam spirit mendorong negara, sistem, dan masyarakat yang memberikan ruang seluas-luasnya terhadap perbedaan pandangan, ideologi, politik, keragaman, bahkan kritik, demi menciptakan kehidupan masyarakat yang terus berbenah menuju keadilan, dan jauh dari kekerasan. Pendekatan Masyarakat Terbuka ini meniscayakan ruang dialog yang inklusif, terbuka, konstruktif, dan kaya dengan jejaring dan kehendak untuk bekerja bersama-sama dengan yang berbeda; memerdekakan masyarakat dari belenggu penindasan dan totalitarisme—di mana hanya ada satu kebenaran yang tunggal dalam sistem dan politik—menuju masyarakat yang kritis dan diberikan ruang untuk ikut andil dalam kebijakan-kebijakan yang adil, dan sistem yang terbuka untuk menampung segala masukan dan suara, untuk tumbuh dan berbenah bersama.

Spirit ini juga menjadi pegangan Tifa dalam memberdayakan kelompok pinggiran—yang rentan dan dilemahkan oleh sistem, untuk turut ambil bagian dalam perubahan, serta berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan publik, dan bagaimana ia diimplementasikan secara adil dan bertanggung jawab, demi dan semata untuk pemenuhan hak dan keadilan yang harus dinikmati oleh semua orang dan kelompok masyarakat tanpa pandang bulu, dan tanpa syarat.

Mereka yang Bergerak di Balik Layar

Di balik Yayasan Tifa dan kerja-kerjanya bagi penguatan demokrasi dan HAM di Indonesia, ada mereka para penggerak, katalisator perubahan, staf, dewan pengurus dan dewan pembina, yang berkolaborasi bersama dalam nafas kesetaraan dan spirit inklusif; memastikan bahwa berbagai program dan advokasi yang dilakukan, baik oleh Tifa atau pun mitra Tifa, dapat berjalan dengan penuh semangat dan harapan. Sebab di tengah ancaman *'politics of hate'*, atau politik kebencian yang kerap dipantik untuk memukul mundur keragaman identitas dan gerakan masyarakat sipil, Yayasan Tifa memegang teguh komitmen untuk terus memunculkan *'politics of hope'*, politik harapan, yang tercermin pula dalam komposisi Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, dan jajaran staf yang berada di Kantor Eksekutif.



Dalam struktur Yayasan Tifa, Para Anggota Dewan memiliki peran untuk membantu memberikan pengarahan dalam program-program strategis yang dijalankan, serta memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait proposal kegiatan yang diajukan. Juga turut memberikan pengawasan kinerja dan implementasi berbagai kegiatan di Kantor Eksekutif.

Bagi para staf atau penggerak di Kantor Eksekutif, tahun 2024 memberikan kesan tersendiri bagi mereka dalam kerja-kerja mereka di bawah payung Tifa. Menurut Project Officer untuk Digital Democracy, Divisi Data Policy and Governance, tahun 2024 ia ibaratkan sebagai hutan bakau atau *mangrove* yang tumbuh di

tempat menantang tapi justru dapat memberikan perlindungan bagi banyak hal: manusia dan alam sekitar yang mengelilinginya. Baginya, “Tifa bukan hanya tumbuh ke atas, tetapi juga menguat ke dalam dan menjalar ke luar” untuk menggambarkan dampak dan kebermanfaatannya kerja-kerja Tifa.

Sementara bagi Project Manager Data Policy and Governance, pengalaman kerja bersama Tifa di tahun 2024 ia gambarkan sebagai pohon bambu—melambangkan proses yang lambat namun kokoh, lentur, dan saling

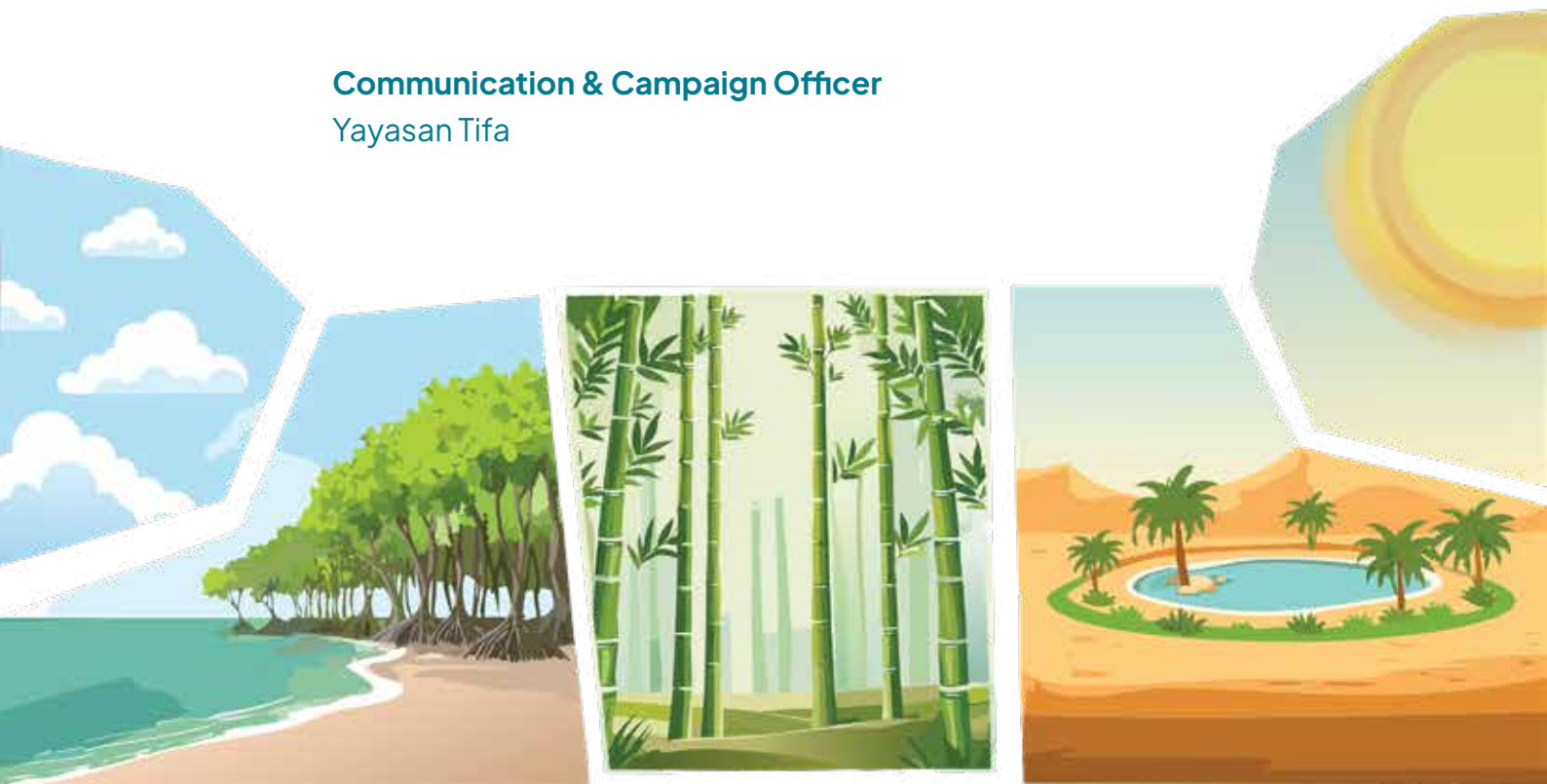
menguatkan. Menurutnya, fokus utama di tahun 2024 mencakup inkubasi simpul keamanan digital lokal, riset dan advokasi akuntabilitas platform digital yang penuh tantangan global, serta advokasi UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang penuh ketidakpastian karena proses yang tertutup. Meskipun pencapaian tampak lambat, namun advokasi kolektif ini terus dilakukan secara konsisten dan tanpa lelah. Tahun ini juga ditandai oleh kolaborasi intensif dengan mitra, menekankan pentingnya kerja bersama yang saling menopang layaknya rumpun bambu.

“ Berkarya di Tifa seperti menemukan oasis dengan banyak pohon dan rerumputan, saat perjalanan panjang di tengah padang pasir yang panas dan melelahkan.

Di sini, saya merasa lebih dimanusiakan. Dengan segala fleksibilitas, apresiasi, dan lingkungan yang inklusif serta egaliter, memberikan angin segar dan tempat istirahat (berkarya) yang nyaman.”

Communication & Campaign Officer

Yayasan Tifa



Jejak Langkah 2024

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2024 menjadi penanda penting dalam perjalanan transformatif Yayasan Tifa—sebuah fase krusial yang meneruskan kelanjutan dari proses kemandirian kelembagaan sejak lepasnya Tifa dari Open Society Foundations pada 2019. Sebagai fase transisi, periode ini tidak sekadar menjadi momentum konsolidasi internal, melainkan juga menjadi ruang pembuktian bahwa Tifa mampu tumbuh sebagai lembaga yang berdaya, adaptif, dan independen. Dengan tetap menjunjung tinggi visi besarnya—mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang terbuka, pluralis, dan toleran—Tifa berkomitmen penuh untuk terus memperjuangkan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan rentan: kelompok minoritas agama dan keyakinan, masyarakat adat, minoritas gender dan seksualitas, serta para korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Sepanjang tahun ini, berbagai capaian strategis berhasil diwujudkan, terutama melalui kerja kolektif dengan berbagai pihak. Misalnya, Yayasan Tifa bekerja sama dengan 11 mitra hibah dari berbagai daerah di Indonesia—Palangkaraya, Kendari, Pekanbaru, Palopo, Sumba Timur, Halmahera Tengah, Jakarta, Pidie, Maluku Utara dan Medan. Tifa juga menjalin kemitraan strategis atau *strategic partnership* dengan berbagai lembaga—Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, KontraS Aceh, Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), Asia Justice and Rights (AJAR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Yayasan Pusaka Indonesia, dan Sawit Watch, serta 6 aliansi/kolektif/konsorsium organisasi masyarakat sipil di level nasional—yakni Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI), Koalisi Kok Perlu, Koalisi Advokasi RUU untuk Pelindungan Data Pribadi (PDP), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Partnership (OGP), Jurnalisme Aman, dan Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital (Koalisi Damai). Tifa mengambil peran penting dalam advokasi kolektif bersama jejaring organisasi dan lembaga lain, yang sekaligus menandai tumbuhnya Tifa



sebagai lembaga kolaboratif dan partisipatif—bukan semata donor—yang terus menggemakan kerja-kerja transformatif secara aktif.

Di bawah naungan tiga cakupan fokus isu: **Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya Alam, dan Tata Kelola Data Digital**, serta melalui 7 program utama yang digerakkan Tifa: **Jurnalisme Aman, Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI), Demokrasi Digital, Keadilan Transisional, Pelindungan Data Pribadi, Aktivisme Digital, dan Mewujudkan Demokrasi Inklusif**, Tifa telah menghasilkan kerja dan keterlibatan penting dalam berbagai advokasi, baik di tingkat nasional melalui jejaring kolaborasi, maupun di level lokal melalui dukungan hibah kepada lembaga dan komunitas akar rumput.

Rekaman ikhtisar perjalanan kerja-kerja Tifa di tahun 2024 bisa dilihat dari berbagai produksi pengetahuan, advokasi kebijakan, dialog, hingga publikasi dan lahirnya berbagai jejaring koalisi, konsorsium dan koalisi penting.

Misalnya, melalui kerja IJRS, lahirah *katahukum.id*, sebuah portal hukum yang bisa diakses masyarakat luas dan kelompok rentan dengan keterbacaan informasi yang inklusif. Dalam konteks mendorong hadirnya ruang aman bagi para Pembela HAM Lingkungan atau EHRD, Tifa menggulirkan serangkaian inisiatif strategis: dari membangun JPLKI, mengaktifkan simpul-simpul pusat keamanan digital di berbagai titik, hingga merisi Jurnalisme Aman dan Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 dan 2024 yang menjadi rujukan penting bagi media. Tifa juga turut andil dalam memperkuat mandat KKR Aceh dan mendorong ruang dialog damai di Papua melalui riset, media, dan forum kebijakan yang membincang dan menyuarakan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu.

Tifa juga melakukan pendampingan terhadap koalisi seperti Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) dan IJRS dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemerintah Indonesia yang Terbuka atau RAN OGI. Bersama Koalisi Masyarakat Sipil



Jagongan Kemah
Sosio-Ekologi di Bali
Yayasan Tifa © 2024

Jagongan Kemah
Sosio-Ekologi di Bali
Yayasan Tifa © 2024



untuk Kebebasan Pers (Kok Perlu), Tifa juga turut menyusun kertas kebijakan tentang tanggung jawab perusahaan platform digital dalam menjamin ruang virtual yang aman. Kolaborasi ini juga menghadirkan pelatihan paralegal yang holistik bagi jurnalis di Jabodetabek. Selain itu, Tifa juga melakukan kemitraan untuk advokasi hak-hak kelompok minoritas keyakinan, gender, dan seksualitas, yang terlihat dalam kemitraan dengan Aliansi Sumut Bersatu di Sumut dan Aceh dalam mendorong akses Adminduk dan perlindungan hukum.

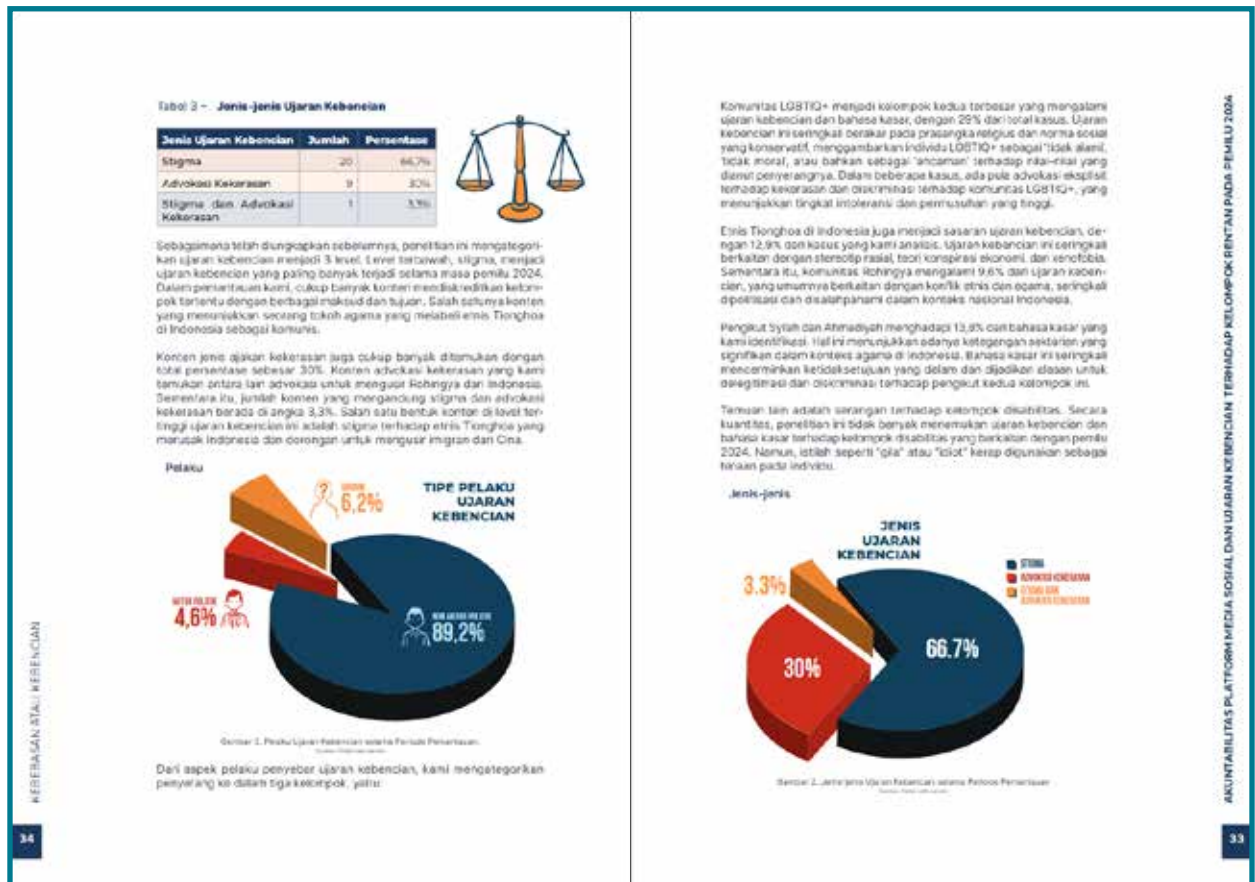
Di sektor pengelolaan sumber daya alam, Tifa mengambil peran penting bagi hadirnya berbagai inisiasi penting bagi lingkungan dan alam yang lestari. Mulai dari Jagongan Kemah Sosio-Ekologi di Bali, menginisiasi terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Kedayakan soal pertanian berkelanjutan berbasis biointensif, pengelolaan lahan kopi agroekologi di Bengkulu, hingga pelatihan nelayan di Maluku Tengah. Tifa juga berhasil mendorong terciptanya ruang-ruang dialog publik dan pelibatan Komnas HAM oleh Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA).

Di soal ketahanan pangan, program-program mitra Tifa juga menghadirkan inisiasi penting seperti Pusat Pangan Keluarga (Puspa) yang menjadi ruang peningkatan kapasitas dalam menanam hortikultura dan mengolah sampah menjadi pupuk organik, hingga membudidayakan larva lalat sebagai tambahan pendapatan.

Dalam konteks penguatan gerakan masyarakat sipil di ruang digital, Tifa juga terus menempuh keterlibatan yang lebih luas. Tifa berkolaborasi dengan Jejaring Kebijakan untuk Akal Imitasi atau Policy Network on Artificial Intelligence dalam menyusun risalah kebijakan tentang regulasi Akal Imitasi yang bertanggung jawab. Melalui kursus daring yang terbuka, yakni Massive Open Online Course (MOOC), Tifa juga berhasil melakukan inovasi dalam menguatkan ruang partisipasi kelompok muda dalam meningkatkan kapasitas aktivisme mereka. Setidaknya 258 organisasi masyarakat sipil sudah dijangkau melalui MOOC Aktivisme Digital. Bersama mitra Ranu Wellum, ruang *fellowship* untuk mitigasi iklim berbasis kearifan lokal Dayak juga telah digelar.

Konsolidasi lintas sektor juga terus diperkuat. Bersama Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Transparency International Indonesia (TII), berbagai diskusi publik dan *toolkit* untuk menangkal narasi negatif telah dihasilkan dengan diseminasi ke beberapa kampus. Selain itu, pelatihan Training of Trainers yang digelar PUSAD Paramadina bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (KUB) dan Kesbangpol Kota Bogor, serta Dinas Pemuda Tangerang Selatan, juga berhasil melibatkan 300 peserta. Tifa juga turut berperan dalam menyusun strategi bersama dalam menghadapi penyempitan ruang sipil. Bersama ELSAM, berbagai produksi produk pengetahuan, audiensi, peningkatan kapasitas Bawaslu dan aktor masyarakat sipil, dan pengawasan tata kelola data dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan untuk mendorong integritas pelaksanaan dan hasilnya.

SAFEEnet, dengan dukungan Tifa, menerbitkan laporan soal dampak media sosial pada kelompok rentan di Pemilu 2024. Selain itu, bersama organisasi mitra lain yang bekerja pada irisan isu HAM dan tata kelola digital, Tifa telah menyusun strategi kerja dan advokasi bersama untuk dua tahun ke depan, termasuk dalam menyikapi dampak pemanfaatan AI bagi HAM serta kekerasan fisik dan digital terhadap aktor masyarakat sipil.



Lini Masa Kerja-kerja Tifa (2024)

Januari

- [23–24 Januari 2024] Workshop Advokasi Rekomendasi Raparasi bersama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, OMS dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Sabang
- LBH Padang berhasil menyepakati Nota Kesepahaman dengan Komisi Yudisial berjudul “Sinergisitas Pemantauan Dan Pengawasan Persidangan Dalam Rangka Menjaga, Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim”
- Focus Group Discussion bersama 15 organisasi terkait Laporan versi Masyarakat Sipil untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) di Indonesia

Februari

- [5 Februari 2024] Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia
- [11 Februari 2024] Penguatan Kapasitas Masyarakat Rentan untuk Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Dampak Perubahan Iklim, Desa Liang, Salahutu, Maluku Tengah
- [27 Februari 2024] Diskusi Multi-pihak Potensi Pengaturan dan Pengendalian Bersama dalam Pelindungan Data Pribadi
- Sosialisasi konsep Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua
- [29 Februari 2024] Dialog Online Tantangan Perubahan Iklim & Dampak bagi Nelayan dan Masyarakat Pesisir di Maluku

Maret

- [6 Maret 2024] Temu Perempuan Peringatan Hari Perempuan Internasional, bersama Perkumpulan Sawit Watch
- [20–21 Maret & 3 April 2024] Rangkaian FGD yang diselenggarakan oleh ALDP dengan Akademisi, Praktisi, Pemerintah, CSO, dan Komunitas Korban mengenai Mekanisme Efektif Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Papua
- [28 Maret 2024] Peluncuran Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 Jurnalisme Aman

April

- [18 April 2024] Pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGI)
- [30 April 2024] Peluncuran Flexible Responsive Fund



Mei

- [26 Mei 2024] Focus Group Discussion: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia–Yayasan Tifa, Tolak Pasal dalam Revisi UU Penyiaran yang mengancam Kemerdekaan Pers
- [27 Mei – 7 Juni 2024] AJAR menyelenggarakan kursus daring tentang Hak Asasi Manusia dan Keadilan Transisi, bersama OMS, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, KKR Aceh, dan BRIN
- [28 Mei 2024] Diskusi dan Workshop: Privacy in the Age of Targeted Advertising, bersama Open Net Korea
- Diseminasi kertas kebijakan tentang resolusi konflik dan membangun perdamaian di Papua oleh Forum Akademisi Papua Damai

Juni

- [10 Juni 2024] Focus Group Discussion: Pelibatan Kelompok Masyarakat Sipil dalam Pelaksanaan Perpres Publisher Rights
- [20–21 Juni 2024] Workshop Aktivasi Simpul Lokal dalam Ekosistem Bantuan Keamanan Digital #1

Juli

- [5–7 Juli 2024] Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Jurnalis, Jakarta
- [15–18 Juli 2024] Pemetaan Kekerasan terhadap Jurnalis, Aceh
- [16–19 Juli 2024] Training Keamanan Holistik bagi Jurnalis, Labuan Bajo, NTT
- [29–30 Juli 2024] Workshop Aktivasi Simpul Lokal dalam Ekosistem Bantuan Keamanan Digital #2

- [29–30 Juli 2024] Pertukaran pembelajaran dan kunjungan ALDP Papua ke KKR Aceh

Agustus

- [2–4 Agustus 2024] Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Jurnalis, Makassar
- [5 Agustus 2024] Focus Group Discussion, Rencana Aksi Kemitraan Masyarakat Terbuka
- [12–13 Agustus 2024] Workshop Aktivasi Simpul Lokal dalam Ekosistem Bantuan Keamanan Digital #3
- SAFEnet – atas dukungan Yayasan Tifa – menerbitkan laporan riset “Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024”
- [18–19 Agustus 2024] Partisipasi dalam sesi Fortifying Frontlines pada Digital Rights in the Asia-Pacific 2024 di Taipei, Taiwan
- [29–31 Agustus 2024] Kerja sama IKOHI Jawa Timur, Yayasan Tifa, dan masyarakat sipil memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional di Surabaya

September

- [1–7 September 2024] Kerja sama SMI dan Yayasan Tifa memperingati September Hitam “Munir: Muda Melawan Bermoral” di Yogyakarta dan Malang



- [14 September 2024] Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh resmi dibentuk di Banda Aceh
- [17–20 September 2024] Rencana Tindak Lanjut Keamanan Digital Bagi Presma wilayah Timur, Ternate
- [20 September 2024] Tifa bersama Forum Asia dan AJAR berpartisipasi dalam ASEAN People's Forum di Dili, Timor Leste
- *Kick-off* implementasi *seed grant* untuk mendukung aktivasi simpul lokal penyedia dan perantara layanan keamanan digital bagi OMS rentan

Oktober

- Sosialisasi Flexible Responsive Fund
- MOOC Aktivisme Digital diluncurkan di UGM
- [9 Oktober 2024] Launching Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh
- [11–13 Oktober 2024] Pelatihan Hukum Kritis untuk Advokasi Konflik Agraria, Cerekeng, Manurung, Sulawesi Selatan
- [15–19 Oktober 2024] Pemetaan Kekerasan terhadap Jurnalis, Palu
- [24 Oktober 2024] Peluncuran kelas daring “Netizen Juga Citizen: Menyemarakkan Aktivisme Digital”



November

- [4 November 2024] KKR Aceh dalam rapat Komisioner menyepakati SOP Internal KKR Aceh tentang Perlindungan Data Pribadi
- [13 November 2024] Pelatihan Dasar Proses Litigasi untuk Sekretariat JPLKI
- [22 November 2024] Pedoman memorialisasi disahkan dalam rapat pleno KKR Aceh
- [23–24 November 2024] Training Advokasi Holistik bagi Jurnalis di Jabodetabek

Desember

- Workshop Respons Hasil Fasilitasi Qanun KKR Aceh
- [3–4 Desember 2024] Workshop Keberlanjutan Inisiatif Aktivasi Ekosistem Bantuan Keamanan Digital bagi OMS Rentan
- [5 Desember 2024] Sosialisasi dan Lokakarya Penguatan Implementasi Wanamina/ Silvofishery dalam Pengelolaan Hutan Desa, Desa Bararawa dan Sapala
- [10 Desember 2024] Kerja Sama SMI dan Yayasan Tifa memperingati Hari HAM dengan diskusi “Apa Kabar Kasus Pelanggaran HAM Hari ini?” di Yogyakarta
- [16–21 Desember 2024] Pemetaan Kekerasan terhadap Jurnalis, Sorong
- [18 Desember 2024] Diskusi Publik “Pentingnya Pengungkapan Kebenaran dan Pemulihan Korban di Papua” di Jayapura
- [19 Desember 2024] Pelatihan Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengembangan Usaha Wanamina yang Berkeadilan Gender

Sorotan bersama Mitra

Menjalin Tenun Solidaritas, Meniti Jalan Perubahan

Sebagai lembaga yang fokus pada kerja-kerja kolaboratif bersama jejaring masyarakat sipil secara luas, **Yayasan Tifa memiliki tiga fokus kemitraan**, yakni kemitraan strategis atau *strategic partnership*, kemitraan melalui pengelolaan dana hibah Call for Proposal, dan kemitraan melalui implementasi program secara langsung atau *direct implementing projects*.

Berikut para mitra Tifa di tahun 2024 dan kerja-kerja mereka melalui tiga saluran kemitraan yang ditempuh oleh Tifa:

Kemitraan Strategis

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh

Lembaga pelaksana UU Pemerintahan Aceh dan Qanun KKR untuk mengadvokasi pelanggaran HAM serta mendorong rekonsiliasi dan reparasi atas kasus masa lalu.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh

Organisasi HAM bagian dari jaringan KontraS yang fokus pada keadilan, kebenaran, dan pemulihan korban melalui advokasi, pendokumentasian, dan pemberdayaan masyarakat terdampak konflik di Aceh.

Alliance of Democracy for Papua (AIDP) atau Aliansi Demokrasi untuk Papua

Organisasi yang berfokus pada advokasi HAM, demokrasi, dan penyelesaian damai konflik Papua melalui riset, dokumentasi, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat adat.

Asia Justice and Rights (AJAR)

Organisasi non-profit berbasis di Jakarta sejak 2009 yang berfokus pada penguatan HAM dan akuntabilitas di Asia-Pasifik, khususnya negara dalam transisi dari konflik atau rezim otoriter menuju demokrasi.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Organisasi masyarakat sipil yang didirikan pengacara dan aktivis HAM untuk mewujudkan masyarakat demokratis, adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di Indonesia.



Seorang nenek di Kampung Adat Nualain, NTT sedang menenun
Dyahnursuci/CC BY 4.0 (2018)

SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network)	Organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pembelaan hak-hak digital di Asia Tenggara, termasuk hak atas akses internet, kebebasan berekspresi, dan keamanan di ruang digital.
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)	Lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi, melakukan advokasi dan memberikan edukasi berbasis bukti melalui riset yang handal dan akuntabel kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.
Koalisi Perempuan Indonesia	Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memperjuangkan keadilan, demokrasi, kesetaraan, dan penolakan segala bentuk diskriminasi serta berkomitmen pada keberagaman, solidaritas, dan kelestarian lingkungan.
Yayasan Pusaka Indonesia	Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) adalah LSM berbadan hukum yang fokus pada perlindungan anak, perempuan, serta isu lingkungan dan iklim, dengan program restorasi hutan, agroforestry, dan pemberdayaan masyarakat untuk mitigasi bencana.
Perkumpulan Sawit Watch	Sawit Watch adalah jaringan organisasi yang fokus pada advokasi, riset, dan publikasi isu lingkungan, agraria, dan perkebunan sawit untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas pengelolaan sumber daya alam yang adil dan lestari.

Kemitraan Pengelolaan Dana Hibah

Yayasan Ranu Welum	Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kerja-kerja lingkungan hidup melalui pengetahuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah.
Himpunan Maluku untuk kemanusiaan (HUMANUM)	Lembaga yang memperjuangkan pemulihan serta pengakuan hak adat, budaya, dan sejarah masyarakat Maluku, sekaligus memperkuat pengetahuan, kearifan, dan keterampilan lokal untuk kemandirian organisasi, ekonomi, dan advokasi.
Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN SULTRA)	Lembaga berbasis di Kendari, Sulawesi Tenggara, yang fokus menyuarakan hak-hak perempuan serta mengkampanyekan penghapusan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau	Organisasi riset-advokasi yang fokus pada kontrol sosial dan promosi transparansi proses penganggaran daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi Riau.
Perkumpulan Wahana Lingkungan Lestari Celebes Area Kota Palopo (Wallacea)	Didirikan untuk kerja-kerja pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal/adat, dan memperkuat kearifan lokal sebagai basis pengetahuan ekologi.
Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (KOPPESDA)	Lembaga nirlaba independen yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis masyarakat secara partisipatif di kawasan Nusa Tenggara.
Perkumpulan Fakawele	Wadah kolaboratif di Halmahera Tengah, Maluku Utara, untuk edukasi dan advokasi kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya melalui pemberdayaan di tingkat desa dan kampung.

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI)	Wadah yang menyediakan pendampingan, peningkatan kapasitas dan penguatan sumber daya manusia untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Yayasan Paska Aceh	Lembaga nonprofit yang fokus pada pengembangan aktivitas sosial ekonomi Aceh dan pemberdayaan para penyintas atau korban konflik Aceh.
Aliansi Sumut Bersatu	Organisasi masyarakat sipil yang sejak tahun 2006 melakukan upaya-upaya penguatan untuk mendorong penghormatan dan pengakuan terhadap keragaman melalui pendidikan kritis, dialog, advokasi dan penelitian.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Sumatera Utara (KontraS Sumut)	Perkumpulan berbasis anggota yang berfokus pada advokasi kasus kekerasan aparat, penyiksaan, penghilangan paksa, konflik sumber daya alam, serta pelanggaran kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA)	Lembaga yang mengadvokasi demokratisasi pengelolaan air dari bawah.
Akar Foundation	Organisasi yang mendorong pengelolaan hutan bagi masyarakat adat dalam mencapai kedaulatan hak atas lingkungan dan tata kelola SDA berkeadilan.
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)	Perkumpulan yang mengupayakan terwujudnya kedaulatan petani dan rakyat atas pangan.
Pusat Studi Agama dan Demokrasi Paramadina	Lembaga otonom riset dan advokasi dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan secara damai dan demokratis.
Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI)	Organisasi yang berfokus pada pembelaan korban pelanggaran HAM, promosi nilai-nilai HAM universal, serta pendidikan dan pelatihan anggota sebagai pembela HAM melalui pendampingan hukum, advokasi, dan kegiatan publik.

Kemitraan Implementasi Proyek

Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI)	Jaringan 22 organisasi masyarakat yang menyediakan perlindungan bagi pembela HAM dan lingkungan di Indonesia, serta membangun ketahanan dan kapasitas kolektif menghadapi risiko dan ancaman dalam kerja-kerja advokasi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers (Kok Perlu)	Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi media, pers, dan masyarakat sipil yang mengadvokasi dukungan negara terhadap jurnalisisme berkualitas melalui <i>Perpres Publisher Rights</i> .
Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP)	Jaringan 30 organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada perlindungan data pribadi di Indonesia melalui advokasi kebijakan, edukasi publik, dan pemantauan implementasi untuk menjamin hak privasi warga di ruang digital.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia	Koalisi 18 organisasi masyarakat sipil yang mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inklusivitas, dan inovasi dalam pemerintahan serta mendesak adanya payung hukum untuk

Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai)	menjamin keterlibatan publik dalam kebijakan. Koalisi Damai, terdiri dari 12 organisasi masyarakat sipil independen, mendorong moderasi ruang digital yang transparan, adil, dan bertanggung jawab sesuai standar HAM internasional melalui pengawasan, advokasi kebijakan, riset, serta kolaborasi lintas pihak.
Jurnalisme Aman	Program kolaborasi Yayasan Tifa, HRWG, dan PPMN yang bertujuan mempromosikan keselamatan jurnalis di Indonesia untuk mewujudkan ekosistem pers yang aman, independen, dan bebas.

Melalui tiga bentuk kemitraan tersebut, Tifa mengambil peran-peran penting dan strategis di berbagai cakupan advokasi, inisiasi, dan kolaborasi partisipatif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional. Di tingkat lokal, misalnya, kemitraan pengelolaan hibah berhasil menjadi ruang peningkatan kapasitas bagi masyarakat di berbagai desa dan kampung di Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

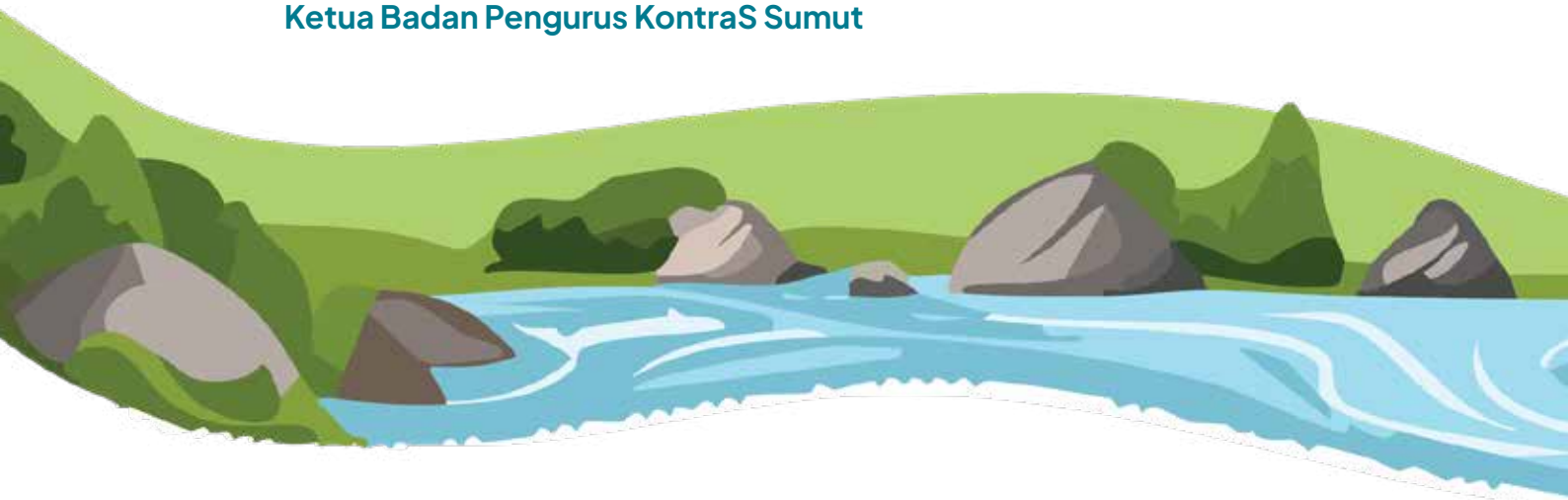
Di Negeri Liang, Salahutu, Maluku Tengah, sebanyak 30 rumah tangga yang telah dilatih oleh Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (Humanum) terkait Budidaya Keramba Jaring Apung, yang didukung oleh Tifa, berhasil memanen ikan dari hasil budidaya mereka, pada Februari 2024. Menurut Direktur Humanum, Elvira Marantika (dalam Siwalimanews.com), panen yang dilakukan dua kelompok nelayan tersebut menunjukkan dampak yang signifikan dan membanggakan, di mana terjadi peningkatan pendapatan para nelayan, bahkan mereka bisa menjualnya di sejumlah restoran di Kota Ambon dengan harga Rp70.000 per kilogram. Dampak dari pelatihan tersebut sekaligus mencerminkan keberhasilan intervensi program Tifa secara langsung kepada masyarakat pesisir yang terdampak perubahan iklim, sehingga pada saat yang bersamaan juga turut meningkatkan daya lenting dan kapasitas nelayan di tengah gempuran cuaca yang mempengaruhi cara mereka bekerja sehari-hari.

Di Bengkulu, program intervensi Tifa berhasil mendorong pengelolaan lahan demplot kopi berbasis agroekologi seluas 30 hektar di Desa Tebat Pulau dan 10 hektar di Desa Baru Manis, Bengkulu. Capaian ini merupakan hasil dari upaya penataan batas partisipatif di lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang menjadi bagian dari kegiatan program yang diusulkan oleh AKAR Foundation yang didukung Tifa. Capaian ini sekaligus memandai dampak Tifa dalam mendorong terciptanya lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat adat maupun komunitas lokal secara mandiri dan berkelanjutan sebagai pengakuan negara terhadap wilayah kelola rakyat.

“ Kerja bersama Tifa seperti air yang mengalir, mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini sulit kami capai, terutama melalui program yang mendorong perlindungan terhadap masyarakat di basis-basis konflik pengelolaan sumber daya alam.”

Amin Multazam

Ketua Badan Pengurus KontraS Sumut



Menurut Amin Multazam, Ketua Badan Pengurus KontraS Sumut, kerja sama dengan Tifa ia analogikan sebagai air yang mengalir, “mengisi ruang-ruang kosong yang selama ini sulit kami capai”. Terutama melalui program yang mendorong perlindungan masyarakat di basis-basis konflik pengelolaan sumber daya alam. Kerja-kerja yang mereka lakukan juga lebih terkonsep serta termanajemen dengan baik sehingga apa yang menjadi capaian kegiatan dapat disusun secara relevan dan terukur dengan jelas. Masih menurutnya, dukungan Tifa telah menjadi ruang bertumbuh dalam soal advokasi dan konsolidasi bersama masyarakat dan komunitas korban konflik pengelolaan SDA di Sumatera Utara. Program mereka menghasilkan produk pengetahuan yang bisa diadopsi dalam bentuk panduan keamanan holistik, daftar inventarisasi berbagai ancaman, serta cara memitigasi sejumlah ancaman yang berpotensi muncul.

Sementara bagi Vivi Zabkie, Head of Social Research di Populix, yang menjadi mitra Tifa dalam riset Indeks Keselamatan Jurnalis 2023, bekerja bersama Tifa digambarkannya serupa bagian dari sebuah akar pohon. “Seperti akar yang tidak berdiri sendiri, kerja kami bersama Tifa terhubung dengan elemen-elemen lain dalam ‘pohon’, mulai dari jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas yang memperjuangkan kebebasan dan keamanan jurnalis dalam bekerja. Kami bangga menjadi bagian dari proses ini!” ungkapnya.

Dalam skala nasional, jejak langkah Tifa di tahun 2024 tersebar dalam beberapa koalisi, konsorsium, dan kerja-kerja kolektif penting, terutama merespons isu-isu

nasional di tengah berbagai ancaman terhadap hak asasi manusia, sumber daya alam, keamanan di ruang digital, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dari mulai Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers (Kok Perlu), Koalisi Advokasi RUU Pelindungan Data Pribadi (KA-PDP), Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia, dan Jurnalisme Aman, Tifa mengambil peran aktif—dan di beberapa ruang bahkan memimpin—dalam mengadvokasi dan menyuarakan berbagai bentuk tuntutan, dukungan, dan pengelolaan yang lebih adil, setara, aman, dan inklusif terkait kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah dari nasional hingga ke desa.



Di level regional, Tifa juga aktif berjejaring dengan beberapa organisasi dari negara lain, baik di konteks Asia Tenggara maupun secara global. Sejak April 2024, Tifa turut berperan dalam penyusunan risalah kebijakan bersama Jaringan Kebijakan terkait Akal Imitasi atau Policy Network on Artificial Intelligence (PNAI) dengan rekomendasi penting tentang tata kelola AI di konteks Selatan Global, yang kemudian dipublikasikan pada Desember 2024 di panggung konferensi global United Nations' Internet Governance Forum (UN-IGF), sebuah forum internasional yang didedikasikan untuk mendiskusikan isu-isu terkait tata kelola internet, keamanan siber, dan hak asasi manusia di ruang digital.

Pada Mei 2024, Tifa juga berkolaborasi bersama Open Net Korea dalam pelatihan bersama organisasi masyarakat sipil terkait pelanggaran privasi akibat model bisnis platform digital, dan bagaimana masyarakat sipil memiliki kesadaran dan peran terkait keamanan di ruang digital.

Di konferensi Digital Rights in the Asia-Pacific (DRAPAC) yang berlangsung di Taipei, Taiwan, pada Agustus 2024, Tifa mengorganisasi sesi yang memfasilitasi refleksi mengenai proyek Tifa yang berfokus mengaktifkan simpul-simpul lokal penyedia layanan dan bantuan bagi masyarakat sipil dan pembela HAM dalam menghadapi ancaman dan serangan digital di daerah. Strategi aktivasi ekosistem

tersebut mendapat sambutan baik atas relevansi dan potensi efektivitas serta keberlanjutannya.

Menjadi bagian dalam Koalisi Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional bersama 40 organisasi masyarakat sipil, Tifa juga turut mengambil peran penting dalam menyusun laporan terkait perkembangan represi dan populisme sektarian di Indonesia, yang disampaikan pada sesi ke-75 Komite Hak-hak Politik dan Sipil, di Jenewa, Maret 2024.



Project Officer untuk Jurnalisme Aman, bersama 10 perwakilan Indonesia, dalam Indonesia Influential Program di Belanda pada Mei 2024. Menandai pengakuan global atas kerja-kerja Tifa.

Yayasan Tifa © 2024

Peran-peran Tifa di berbagai level tersebut menjadi wajah dan bukti reflektif tentang komitmen, kerja, dan dampak kerja-kerja Tifa secara menyeluruh dalam berbagai isu penting dan strategis terkait hak asasi manusia, demokrasi, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan bagi jurnalis dan kelompok rentan, masyarakat adat, dan keamanan di ruang digital. Sekaligus menggambarkan relevansi kerja-kerja Tifa yang terus tumbuh, mengakar, dan menguat, seiring dengan konteks perkembangan situasi kebudayaan, politik, ekonomi, dan ruang-ruang siber yang terus melaju kencang.

Suara-Suara dalam Data dan Angka

Menjaring, Mendengar, dan Menyuarakan Cerita-cerita Perubahan

Sepanjang tahun 2024:

13,885
Pemangku Hak



atau individu, terlibat dan terjangkau dalam program dan kegiatan Yayasan Tifa

116
Kelompok Masyarakat

terlibat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah di level desa, kecamatan, dan kabupaten

110
Lembaga



terlibat dalam jejaring, kerja, koalisi dan program atau kegiatan Tifa

250
Polisi



menerima pelatihan terkait kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis

760 mengisi Indeks Keselamatan Jurnalis 2024



1,079
Korban Pelanggaran HAM

di Aceh mengisi asesmen terkait data kebutuhan reparasi korban di 14 kab./kota se-Aceh

85 Seminar, lokakarya, pelatihan, dialog, dan peningkatan kapasitas dilaksanakan oleh Tifa maupun mitra yang didukung Tifa



48 Produk Pengetahuan

: risalah kebijakan, modul, siaran pers, riset, publikasi, & portal, dihasilkan, baik oleh mitra Tifa maupun Tifa

40 hektare lahan

demplot kopi berbasis agroekologi berhasil disediakan pemerintah di Desa Tebat Pulau dan Baru Manis untuk pengelolaan Hutan Kemasyarakatan



Terdapat sejumlah capaian signifikan dalam kerja-kerja Yayasan Tifa di tahun 2024 sebagai wujud komitmen Tifa untuk terus membicarakan, menyuarakan, dan melatih para individu, aktivis, penggerak, dan organisasi masyarakat sipil yang *resilient* dan berdaya memperjuangkan hak asasi manusia, lingkungan hidup, demokrasi di ruang digital, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan jurnalisme yang aman di Indonesia. Setiap langkah yang ditempuh dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan berfokus pada pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat yang selama ini terpinggirkan, dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

13.885 pemangku hak, terdiri dari individu dan komunitas-komunitas yang selama ini terabaikan, telah dilibatkan dan dijangkau dalam berbagai program dan kegiatan yang digagas oleh Tifa. Pelibatan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap suara, terutama dari kelompok yang rentan, mendapatkan perhatian yang layak dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Program-program ini dirancang untuk memperkuat peran aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, serta memberikan ruang untuk dialog yang inklusif.

Tifa menyadari bahwa pencapaian yang lebih luas dan berdampak memerlukan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, 110 lembaga telah terlibat dalam jejaring, kerja sama, dan berbagai program yang dilaksanakan oleh Tifa maupun mitra Tifa, baik melalui implementasi program maupun melalui koalisi, konsorsium, dan inisiasi kolektif bersama lembaga lain dalam merespons isu-isu penting. Melalui kolaborasi ini, berbagai topik-topik krusial seperti kebebasan pers, hak asasi manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat lebih diperjuangkan dengan pendekatan yang lebih holistik.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan yang berbasis pada riset dan kebijakan, 48 produk pengetahuan, yang meliputi risalah kebijakan, modul, siaran pers, riset, publikasi, dan portal informasi, telah dihasilkan. Misalnya, Jurnalisme Aman (jurnalismeaman.com)—yang menjadi salah satu *flagship* atau produk pengetahuan penting yang bisa diakses secara inklusif oleh publik, menjadi ruang virtual yang memberikan akses bagi masyarakat terhadap berbagai edukasi, infografis, layanan *self-assessment*, modul pelatihan, bahkan hingga kelas-kelas gratis terkait Keamanan Digital, Keamanan Komunikasi, Advokasi Psikologis dalam Keamanan Digital, Perilaku Aman di Dunia Digital dan Media Sosial, dan Manajemen Kata Sandi dan Data Digital.

Produk-produk pengetahuan ini tidak hanya disusun oleh Tifa, tetapi juga oleh mitra-mitra yang bekerja sama dalam proyek-proyek bersama. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi jejaring dalam berbagi pengetahuan dalam mendorong perubahan yang berbasis pada bukti dan kerja-kerja kolektif bersama.



Peluncuran Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 pada 28 Maret 2024

Yayasan Tifa © 2024

Pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam membangun kapasitas masyarakat dan pemangku kebijakan menjadi perhatian utama Tifa. Sebanyak 85 seminar, lokakarya, pelatihan, dan dialog telah dilaksanakan oleh Tifa bersama dengan mitra-mitra yang terlibat. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas para aktivis, jurnalis, dan pihak-pihak terkait dalam menghadapi tantangan yang ada di lapangan.

Melihat pentingnya perlindungan terhadap jurnalis di tengah ancaman yang semakin besar terhadap kebebasan pers, 760 jurnalis telah mengisi Indeks Keselamatan Jurnalis 2024. Hal ini menjadi dasar penting dalam memahami sejauh mana jurnalis menghadapi risiko dalam menjalankan tugas mereka. Tifa terus bekerja untuk memberikan perlindungan dan mendukung jurnalis dalam menjalankan tugasnya tanpa takut akan ancaman yang membahayakan keselamatan mereka.

Di bidang hak asasi manusia, 1.079 korban pelanggaran HAM di Aceh telah mengisi asesmen terkait kebutuhan reparasi korban, yang dilaksanakan di 14 Kabupaten/ Kota se-Aceh. Hasil asesmen ini menjadi data penting yang diolah sebagai bahan dalam rancangan teknis regulasi reparasi. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan korban dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada pemulihan hak-hak mereka. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap korban pelanggaran HAM mendapatkan keadilan, pemulihan, dan reparasi yang layak.

Tifa juga terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Sebanyak 116 kelompok masyarakat di Tuban dan Barito Utara, yang menjadi salah satu cakupan wilayah kerja mitra Tifa, telah dilatih untuk memahami dan mengadvokasi hak-hak mereka sebagai bagian dari proses pembentukan dan implementasi kebijakan. Mereka terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat

desa, kecamatan, dan kabupaten. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

“Berbagai pelibatan ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap suara, terutama dari kelompok yang rentan, mendapatkan perhatian yang layak dalam perumusan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.”

Sebagai bentuk peningkatan kapasitas aparatur negara dalam melindungi hak-hak masyarakat sipil, 250 polisi menjadi peserta pelatihan terkait kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Melalui enam pelatihan yang dihelat masing-masing di Lampung, Nusa Tenggara Barat, Surabaya, Papua, Sulawesi Utara dan Maluku Utara sepanjang 2024, loklatih ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparat penegak hukum mengenai kebebasan pers dan hak jurnalis untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas dan tanpa ancaman. Pelatihan ini merupakan bagian dari Jurnalisme Aman, kerja sama Tifa bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG).

Di sektor lingkungan, Tifa berhasil mengadvokasi pengelolaan lahan berbasis rakyat. Seluas 40 hektar lahan demplot kopi berbasis agro-ekologi telah disediakan oleh pemerintah di Desa Tebat Pulau dan Desa Baru Manis, Bengkulu. Dengan upaya ini mendorong pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis komunitas, yang memberikan kesempatan bagi warga lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sambil menjaga keseimbangan ekologis.

Dalam soal advokasi terkait keamanan di ruang digital, sebanyak 168 peserta pelatihan Keamanan Digital di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia mengalami 29% peningkatan pemahaman terkait Keamanan

Perangkat, Keamanan Komunikasi, Keamanan Akun, dan Keamanan Ponsel. Selain itu, pelatihan tentang perlindungan data pribadi juga telah diberikan kepada 59 jurnalis di Jakarta dan Makassar, yang menunjukkan 23% peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga data pribadi dalam konteks kerja jurnalistik.

Berbagai pelatihan ini juga dilanjutkan dengan aktivasi Pusat Sumber Daya Keamanan Integral melalui terbentuknya simpul-simpul lokal di Yogyakarta, Bali, dan Palu-Poso sebagai pusat keamanan digital. Dari simpul-simpul inilah, Tifa kemudian menyusul Jejaring Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI) sebagai corong strategi kolektif untuk memberikan dukungan perlindungan bagi masyarakat rentan di Indonesia, utamanya pembela HAM dan lingkungan yang kian hari kian terjepit dalam pusaran potensi ancaman fisik dan digital, di ruang nyata dan ruang siber, ketika mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam soal terampasnya ruang-ruang hidup, tercatat sebanyak 687 konflik agraria terjadi, dengan tumpang tindih seluas 6,6 juta hektar antara wilayah adat dan area konsesi perusahaan. Akibatnya, sebanyak 925 anggota masyarakat adat mengalami kriminalisasi, 60 orang menjadi korban kekerasan. Dalam situasi yang demikian, JPLKI menjadi salah satu ruang kolektif untuk merespons potensi ancaman terhadap para pembela HAM lingkungan. Sepanjang tahun 2024, setidaknya JPLKI telah mendukung beberapa korban dalam kasus pelanggaran HAM dan kriminalisasi berbasis lingkungan, beberapa di antaranya seperti konflik agraria yang menimpa masyarakat Adat Tano Batak, penggusuran paksa di Rempang, penggusuran di Bongsuwung Yogyakarta, dan kriminalisasi warga Pakel, Surabaya.

Dukungan yang diakses melalui JPLKI telah membantu para pemangku hak untuk mengatasi dan memitigasi situasi ancaman yang mereka hadapi. Selain itu, salah satu dampak tidak langsung yang signifikan yang muncul adalah tumbuhnya resiliensi atau daya lenting dari para pemangku hak dari kalangan pembela HAM dan Lingkungan. Misalnya, dukungan dari JPLKI digunakan oleh LINK-AR Borneo untuk membentuk tim pengacara permanen dalam koalisi Mawayana untuk mengadvokasi konflik agraria dan kekerasan terhadap masyarakat adat di Kalimantan Barat. Sementara dalam kasus kriminalisasi dua nelayan penolak tambang nikel di Torobulu, Konawe, Sulawesi Tenggara, dukungan JPLKI digunakan untuk advokasi lahirnya rekomendasi Komnas HAM untuk pengadilan terkait perlindungan pembela HAM yang menjadi bukti dukungan dalam persidangan. Melalui JPLKI, Tifa memainkan peran pentingnya secara interseksional dan holistik dalam memperkuat jejaring dan mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia.

Suluh Resiliensi

Menyalakan Harapan di Ruang-ruang Pemberdayaan



Titik-titik Kerja Tifa

- Pidie, Aceh
- Medan, Sumatera Utara
- Padang, Sumatera Barat
- Rejang Lebong, Bengkulu
- Pekanbaru, Riau
- Lampung
- Palembang, Sumatera Selatan
- Pali, Sumatera Selatan
- Jakarta
- Bogor, Jawa Barat
- Sukabumi, Jawa Barat
- Bandung, Jawa Barat
- Cirebon, Jawa Barat
- Yogyakarta
- Tuban, Jawa Timur
- Surabaya, Jawa Timur
- Bali
- Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
- Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
- Palangka Raya, Kalimantan Tengah
- Barito Utara, Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Mamuju, Sulawesi Barat
- Palu, Sulawesi Tengah
- Poso, Sulawesi Tengah
- Sulawesi Tenggara
- Palopo, Sulawesi Selatan
- Luwu Timur, Sulawesi Selatan
- Makassar, Sulawesi Selatan
- Ternate, Maluku Utara
- Halmahera Tengah, Maluku Utara
- Maluku Tengah, Maluku
- Papua

Jurnalisme Aman

Meliput tanpa Rasa Takut, Mengabarkan tanpa Beban, Bersuara dengan Merdeka



Ilustrasi Pers | Envato

Jurnalisme Aman (JA) lahir dari denyut kepedulian dan keberanian kolektif masyarakat sipil terhadap memburuknya iklim kebebasan berekspresi di Indonesia. Di tengah meningkatnya ancaman terhadap jurnalis—baik dalam bentuk kekerasan fisik, digital, hingga tekanan institusional—program ini hadir sebagai momentum penting: terciptanya ruang kerja jurnalis yang aman, bebas dari rasa takut, dan bebas dari berbagai macam ancaman.

Berangkat dari pemahaman bahwa keselamatan jurnalis adalah fondasi penting dari demokrasi yang sehat, JA menetapkan dua pilar utama dalam visinya. **Pertama**, membangun mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif bagi jurnalis yang mengalami kekerasan atau intimidasi. **Kedua**, memperkuat kesadaran kolektif dan komitmen lintas sektor bahwa perlindungan terhadap jurnalis adalah tanggung jawab bersama.

Dilaksanakan sejak 2021 hingga 2025, proyek ini diprakarsai oleh konsorsium yang dipimpin oleh Yayasan Tifa, bersama Human Rights Working Group (HRWG) dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), serta didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta. JA tumbuh dalam kolaborasi erat dengan berbagai mitra strategis: Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), LBH Pers, PPMI, hingga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 2024, JA menandai tonggak penting dengan menyelenggarakan serangkaian Pertemuan Multipihak Media Regional guna memperkuat mekanisme

pengaduan berbasis wilayah. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, proses ini berhasil menghasilkan peta kekerasan terhadap jurnalis yang mencerminkan kompleksitas medan kerja jurnalistik di wilayah barat (Aceh), tengah (Palu), dan timur (Sorong). Dari ruang penyusunan berita hingga lokasi liputan di lapangan, bentuk-bentuk kekerasan terpetakan secara mendalam, memperlihatkan pola impunitas, ketimpangan struktural, dan hambatan akses terhadap keadilan.

Pemetaan ini bukan sekadar dokumen data, melainkan cermin dari kisah-kisah manusia—jurnalis yang menghadapi intimidasi, kekerasan berbasis gender, hingga penghapusan digital yang sunyi namun melumpuhkan. Laporan komprehensif hasil riset ini dijadwalkan untuk diluncurkan pada 2025 sebagai dokumen strategis yang akan digunakan dalam advokasi kebijakan publik, peningkatan kapasitas, dan penyusunan protokol perlindungan jurnalis yang lebih tajam dan kontekstual.

Pada Juni dan Juli 2024, JA menyelenggarakan pelatihan hak atas kebebasan pers dan perlindungan jurnalis bagi ratusan aparat kepolisian di enam wilayah Polda, dari Lampung hingga Ternate. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan peserta dengan risalah kebijakan berbasis bukti, tetapi juga membuka ruang dialog yang jujur dan konstruktif antara polisi dan jurnalis. Apresiasi dari para Kapolda menjadi penanda penting bahwa perubahan bisa tumbuh dari ruang-ruang dialog yang

tulus. Mereka menyatakan komitmen untuk mendukung kerja jurnalistik yang merdeka dari intimidasi dan turut serta membangun sistem perlindungan yang lebih tangguh.

Kekuatan utama JA terletak pada jejaring kolaboratif yang terus diperluas dan diperkuat. Aliansi dengan AJI, KKJ, dan komunitas jurnalis lokal telah membuahkan praktik perlindungan yang lebih adaptif dan cepat tanggap. Upaya kolektif ini membentuk jalinan solidaritas yang mampu menyediakan bantuan hukum, pendampingan psikososial, serta sistem rujukan darurat ketika ancaman datang tak terduga.

Jurnalisme Aman berdiri di antara harapan dan perjuangan. Di satu sisi, ia menyuarakan impian akan ruang demokrasi yang sehat dan berpihak pada publik. Di sisi lain, ia mewujudkan dalam kerja-kerja nyata: pelatihan, advokasi, riset, dan pemetaan. Dengan memperluas kemitraan dan memperkuat strategi pendanaan yang berkelanjutan, JA memastikan bahwa jurnalis di Indonesia tidak hanya didengar, tetapi juga dilindungi. Sebab

setiap berita yang mereka kabarkan adalah nadi demokrasi yang tak boleh berhenti.



Indeks Keselamatan Jurnalis 2023
Yayasan Tifa © 2024

Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI)

Membangun Jejaring Saling Jaga dengan Sistem Dukungan Terintegrasi



Ilustrasi Jaringan
Envato

Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI) hadir sebagai ruang kolaboratif lintas organisasi masyarakat sipil untuk melindungi Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan hidup di Indonesia. Di dalamnya, terdapat 23 organisasi yang tergabung dalam “Majelis Anggota” yang saling terhubung dalam kerja kolektif menyediakan berbagai layanan keamanan menyeluruh—mulai dari perlindungan fisik, bantuan hukum, keamanan digital, dukungan dana darurat, layanan psiko-sosial, hingga riset dan advokasi yang kontekstual. Selain itu, terdapat Komite Pengarah (Steering Committee) yang bertanggung jawab menyusun rencana strategis sesuai fokus isu yang diprioritaskan oleh Majelis Anggota.

JPLKI hadir untuk mendukung kerja-kerja para Pembela HAM dan Lingkungan dalam semangat pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui jaringan ini, organisasi-organisasi penyedia layanan dapat saling terhubung dan bersinergi, memperkuat kolaborasi lintas sektor demi memastikan tersedianya dukungan yang holistik. Tidak hanya itu, JPLKI juga berkomitmen untuk memperkuat kapasitas kolektif anggotanya dengan menyediakan akses kepada tenaga ahli serta sistem rujukan layanan antar anggota, baik dalam satu klaster maupun lintas klaster, agar perlindungan terhadap para pembela dapat ditangani secara cepat dan tepat.

JPLKI memainkan dua peran yang saling menguatkan. **Sebagai jaringan**, ia berdiri secara lentur dan non-hierarkis. Di saat yang sama, JPLKI juga difasilitasi dalam bentuk **program** oleh Yayasan Tifa yang berperan sebagai Sekretariat. Melalui peran ini, Yayasan Tifa menjadi penggerak koordinasi harian—menyelenggarakan pertemuan strategis, mengelola administrasi, dan mengatur jalannya Dana Fleksibel-Responsif (Flexible Responsive Fund). Dengan demikian, JPLKI tidak

hanya menjadi simpul penghubung antar penyedia layanan keamanan, tetapi juga sistem perlindungan kolektif yang hidup dan adaptif.

Salah satu jantung dari kerja JPLKI adalah pengelolaan Dana Fleksibel-Responsif, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mendesak dan jangka pendek bagi Pembela HAM dan Lingkungan yang mengalami situasi darurat. **Dana ini terbagi dalam dua skema berdasarkan skala prioritas: (1) Dana Responsif yang terdiri dari Dana Darurat dan Dana Penanganan Tindak Lanjut); dan (2) Dana Pengembangan Kapasitas.** Pembela HAM dan Lingkungan dari berbagai sektor yang menghadapi ancaman nyata, atau organisasi yang mendampingi mereka, dapat mengakses dukungan ini apabila dalam kerja-kerjanya mendapatkan kekerasan baik fisik, non-fisik dan digital.

Flexible Responsive Fund

Dalam rangka memberikan dukungan maksimal dan komprehensif kepada para Pembela HAM dan Lingkungan yang mengalami ancaman, kekerasan dan kriminalisasi saat mempromosikan dan memperjuangkan HAM dan perlindungan atas lingkungan, Yayasan Tifa selaku Sekretariat Nasional Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI) saat ini mengelola **Flexible Responsive Fund (FRF)**.

Apa itu Flexible Responsive Fund?

Flexible Responsive Fund (FRF) merupakan dana yang tersedia di Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI) yang ditujukan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada aktivis, Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dan Lingkungan yang menghadapi ancaman, kekerasan, atau kriminalisasi. Selain itu, dana ini dapat digunakan juga untuk memperkuat kapasitas penyedia layanan guna memungkinkan pemberian layanan yang lebih baik dan memberikan keahlian yang diperlukan untuk membantu Pembela HAM dan Lingkungan yang menghadapi kekerasan, termasuk upaya pencegahan.

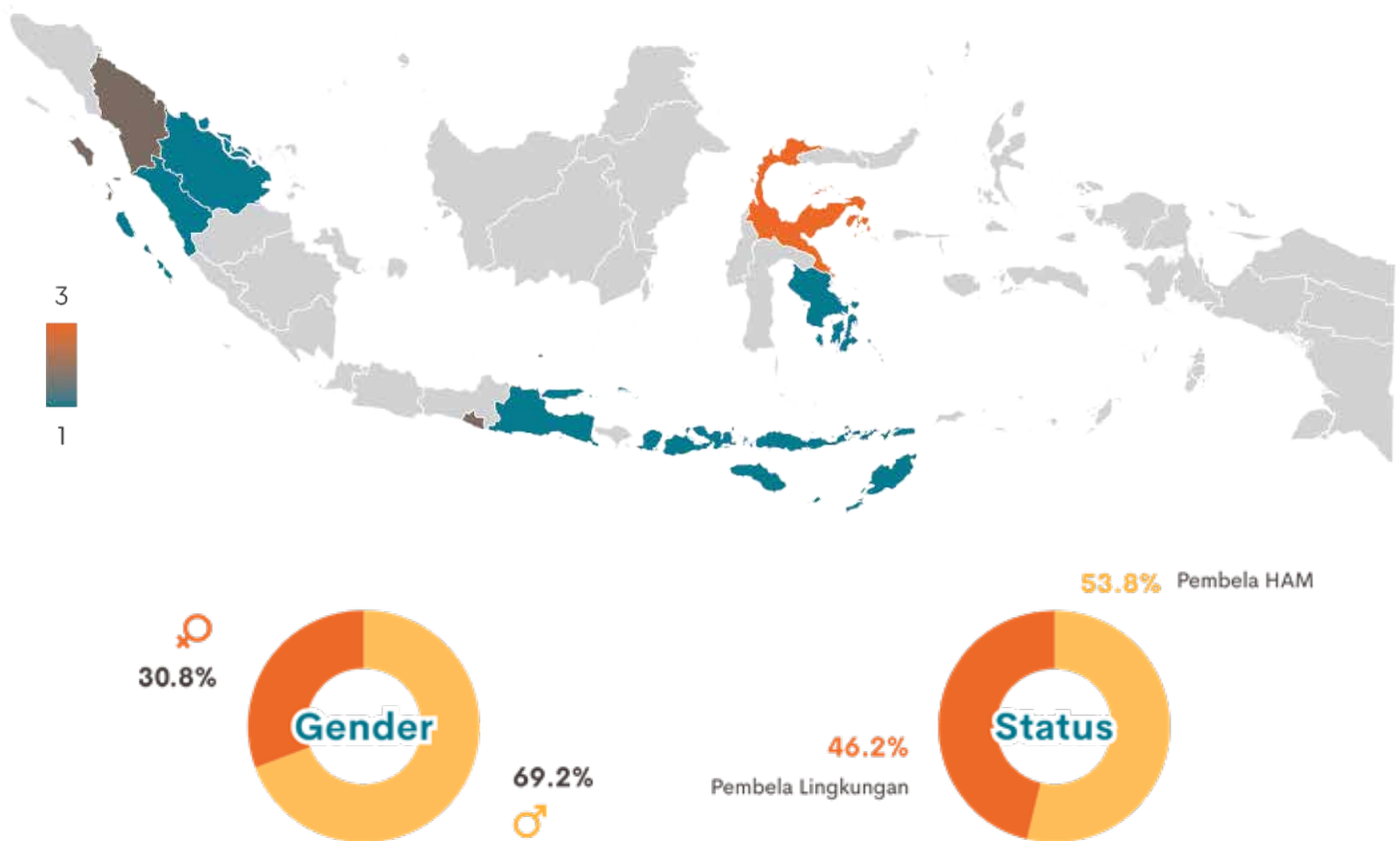
Tujuan

Menyediakan dana yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan Pembela HAM dan Lingkungan yang menghadapi ancaman, kekerasan, atau kriminalisasi. Meningkatkan mekanisme pemberian layanan perlindungan kepada Pembela HAM dan Lingkungan sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan efektif.

Publikasi Dana Fleksibel-Responsif di Media Sosial
Yayasan Tifa © 2024

Hingga akhir 2024, Dana Darurat dan Dana Penanganan Tindak Lanjut telah menjangkau 13 - komunitas Pembela HAM dan Lingkungan yang mengalami kriminalisasi, penghilangan ruang hidup, kekerasan, gugatan perdata, dan serangan digital. Respons yang diberikan bervariasi dan terintegrasi—mulai dari bantuan hukum, bantuan pengobatan, layanan psikis, bantuan langsung bagi keluarga terdampak, hingga relokasi ke rumah aman. Ini bukan sekadar tanggap darurat, melainkan bentuk solidaritas konkret dalam menghadapi represi sistemik.

Peta Sebaran dan Kategori Penerima Dana Fleksibel-Responsif 2024



Sebaran kasus tertinggi terjadi di wilayah Indonesia Barat (Riau-NTB, 8 kasus), diikuti Indonesia Tengah (Sulawesi Tengah, 3 kasus), dan Indonesia Timur (Sulawesi Tenggara-NTT, 2 kasus). Hampir semua kasus berkaitan erat dengan konflik agraria, terutama di sektor perkebunan sawit (7 kasus), pertambangan nikel (2 kasus), serta penggusuran ruang hidup warga di wilayah urban (2 kasus). Gambaran ini mencerminkan betapa berat dan kompleks tantangan yang dihadapi pembela hak atas tanah, lingkungan, dan ruang hidup yang adil (*land, indigenous peoples' and environmental rights defenders*).

Hasil evaluasi JPLKI Periode 2024 menunjukkan bahwa Dana Responsif berperan sangat krusial. Di Buol, misalnya, Forum Petani Plasma Boul yang dikriminalisasi mendapatkan pendampingan hukum yang semula sulit dijangkau. Di Rempang, dana darurat memungkinkan warga yang ruang geraknya dibatasi untuk memperbaiki posko perjuangan yang sempat dibakar aparat. Di Borneo, dukungan dana darurat memberikan dampak signifikan dalam bentuk lahirnya inisiasi baru tim pengacara permanen untuk mengadvokasi konflik agraria dan masyarakat adat di Kalimantan Barat. Bantuan ini bukan hanya memulihkan, tetapi juga memperkuat semangat kolektif perlawanan dan keberanian untuk terus bertahan.

Demokrasi Digital

Menggemakan Aktivisme Digital dan Ruang Siber Aman tanpa Ancaman



Demokrasi Digital lahir dari kesadaran bahwa keamanan di ruang digital bukanlah sekadar isu teknis, melainkan persoalan martabat, keberlanjutan perjuangan, dan hak asasi setiap warga, terutama mereka yang bekerja di garis depan membela kebenaran dan keadilan. Di bawah naungan Divisi Kebijakan dan Tata Kelola Data, program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem penyediaan layanan dan bantuan untuk pembela HAM dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam menghadapi dinamika ancaman digital yang semakin kompleks.

Dengan mengembangkan model hub komunitas sebagai fondasi memperluas jangkauan layanan keamanan digital dan meningkatkan kesesuaian layanan dengan kebutuhan penggunanya, Demokrasi Digital menghormati keberagaman kapasitas, konteks, dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Dalam prosesnya, Yayasan Tifa menempuh tiga langkah strategis: **pertama**, memetakan lanskap penyedia layanan keamanan digital yang telah bekerja di berbagai wilayah; **kedua**, memperkuat kapasitas lokal melalui intervensi yang kontekstual dan kolaboratif; dan **ketiga**, merancang strategi jangka panjang bersama pemangku kepentingan untuk mengembangkan ekosistem perlindungan digital yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Dengan semangat kolaborasi yang egaliter, Tifa merajut jaringan kerja dengan lima simpul lokal yang berperan sebagai perantara layanan keamanan digital: **Combine Resource Institution (CRI)** di Yogyakarta, **Hansip Bokir** di Jawa Barat, **Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK)** di Kalimantan Barat, **Srikandi KBGO** di Palu dan Jawa Barat, serta **Bangsa Mahardika** yang menjangkau komunitas muda dan mahasiswa.

Bersama mereka, Tifa menyelenggarakan serangkaian lokakarya—bukan hanya sebagai ruang pelatihan, tetapi sebagai tempat bertemunya pengetahuan lokal, pengalaman hidup, dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan digital. Beberapa di antaranya mencakup **Aktivasi Jejaring Keamanan Digital** di Sukabumi, Lokalatih Penanganan KBGO di Palu, hingga pelatihan penanganan kasus serangan digital di Kalimantan Barat.



Lokakarya Ideasi “Mengaktifkan Ekosistem Bantuan Keamanan Digital bagi Organisasi Masyarakat Sipil Rentan” pada September 2024

Yayasan Tifa © 2024

Demokrasi Digital juga bertumbuh dalam ekosistem yang kaya, berjejaring erat dengan organisasi seperti SAFEnet, TRACE, dan Digital Security Helpline Access Now. Dalam kemitraan ini, Tifa mengambil peran sebagai penggerak perubahan: mendengarkan dengan empati, menjawab dengan kepakaran, dan bertindak dengan keberpihakan pada kelompok paling rentan—aktivis akar rumput, jurnalis perempuan, pembela HAM di daerah konflik, serta minoritas gender dan seksual yang kerap menjadi target kekerasan digital.

Dampak nyata dari program ini dapat dilihat dari lahirnya ketersediaan layanan keamanan digital yang inklusif dan adaptif. Organisasi-organisasi yang terlibat tak hanya memperkuat kapasitas teknisnya, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri para penggeraknya untuk bergerak lebih strategis dan berani. Ruang-ruang pertemuan yang dibentuk melalui jejaring Demokrasi Digital melahirkan solidaritas lintas identitas, mempertemukan pengalaman dan strategi lintas wilayah dan isu. Di sinilah kekuatan sejati dari program ini bertumbuh: dalam ikatan kolektif yang tidak hanya menjaga, tetapi juga merawat dan memperkuat perjuangan menuju ruang digital yang adil, aman, dan membebaskan bagi semua.

Keadilan Transisional

Mengais dari Kesunyian: Menyuarakan Pemulihan Luka Korban Pelanggaran HAM



Sejak awal keberadaannya, Yayasan Tifa telah menjadikan keadilan transisional sebagai salah satu poros utama perjuangannya. Keadilan transisional—sebuah pendekatan multidimensional yang mengupayakan kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di masa lalu—tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat mekanisme hukum dan kelembagaan, tetapi juga sebagai jalan panjang untuk menyembuhkan luka kolektif dan membangun masa depan yang inklusif, adil, dan damai.

Di Aceh, proses penyusunan kebijakan reparasi bagi korban terus bergerak maju. Dalam workshop yang digelar pada Januari 2024 di Sabang, Tifa memfasilitasi ruang kolaboratif antara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Badan Reintegrasi Aceh (BRA), dan organisasi masyarakat sipil. Hasil dari proses ini adalah rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang reparasi, yang telah disampaikan ke Biro Hukum Pemerintah Aceh pada Juli 2024. Lebih jauh, isu reparasi berhasil diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, menandai bahwa pemulihan korban kini menjadi bagian dari visi pembangunan strategis daerah.

Tak hanya di level kebijakan, KKR Aceh juga memperkuat kerja berbasis bukti dengan menjalin kerja sama bersama Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani, keduanya menyusun model reparasi komprehensif yang berbasis pada kebutuhan nyata korban. Sebanyak 1.079 data korban yang tersebar di 14 kabupaten/kota kini sedang dalam proses

asesmen mendalam. Namun, tantangan tetap mengemuka—khususnya dalam implementasi program reparasi, di mana sebagian besar korban masih belum merasakan manfaat langsung dari kebijakan yang ada.

Peran masyarakat sipil tak tergantikan dalam perjuangan ini. **Konsolidasi Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK)** menjadi ruang penting untuk merumuskan strategi advokasi baru. Konferensi yang digelar di Jakarta dan dihadiri peserta dari 13 provinsi menjadi bukti kuatnya semangat kolektif untuk mendorong pengungkapan kebenaran dan menuntut keadilan. Meskipun Rancangan Undang-Undang tentang KKR belum menjadi prioritas legislasi nasional, inisiatif-inisiatif KKR lokal terus diperkuat sebagai respons terhadap kebutuhan spesifik komunitas, termasuk di Papua.



Konferensi Inisiatif Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Tantangan Membangun Perdamaian dan Mendorong Akuntabilitas pada 30–31 Juli 2024
AJAR dan KontraS Aceh © 2024

Di Papua, kerja-kerja membangun ruang dialog damai terus diperluas. **Forum Akademisi Papua Damai** yang didukung Tifa turut berkontribusi dalam mendorong diskursus publik tentang upaya membangun perdamaian di Papua, salah satunya melalui pembentukan KKR Papua. Risalah kebijakan atau *policy paper* yang mereka hasilkan telah diseminasi kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas korban dan masyarakat luas, melalui dialog interaktif di radio dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil riset yang menggali persoalan Otonomi Khusus Jilid 1 dan dinamika pembangunan Papua juga menjadi materi penting dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti dan pengalaman komunitas.

Bagi Tifa, keadilan transisional bukan sekadar agenda masa lalu, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan. Ia bukan hanya tentang memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tapi juga tentang membangun pondasi sosial baru yang mengakui keberagaman, merawat ingatan kolektif, dan mengedepankan martabat manusia.

Pelindungan Data Pribadi

Data Kita, Suara Kita, Kuasa Kita



Ilustrasi Keamanan Digital | Envato

Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, pelindungan data pribadi (PDP) bukan sekadar isu teknokratis, melainkan bagian esensial dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara. Dalam konteks pemilu dan penguatan peran masyarakat sipil, Yayasan Tifa telah mengambil langkah strategis dengan menyampaikan serangkaian rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Rekomendasi tersebut mencerminkan suara masyarakat—dari organisasi masyarakat sipil, jurnalis, hingga warga biasa—yang selama ini menjadi pengguna sekaligus pelindung data pribadi mereka sendiri. Beberapa usulan, seperti pengakuan terhadap keberadaan pengendali data gabungan, telah diakomodasi. Namun, ruang partisipasi publik, jaminan kebebasan pers, dan hak atas lupa masih belum sepenuhnya mendapat tempat dalam draf regulasi. Hingga November 2024, peraturan turunan tersebut masih berada dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM—menggambarkan bahwa perjuangan advokasi belum usai, dan suara dari akar rumput masih harus terus diperkuat.

Upaya untuk melembagakan prinsip-prinsip PDP di ranah masyarakat sipil pun menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Sebanyak 336 individu dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) telah mengikuti pelatihan yang dirancang oleh Yayasan Tifa. Tidak hanya berhenti di ruang kelas, 31 OMS dan 24 OBH telah mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut—melalui penggunaan *consent form*, pengelolaan data pribadi yang lebih etis di kanal publik, dan bahkan menyusun kebijakan internal yang menjadi pijakan organisasi dalam menjaga privasi komunitas yang mereka dampingi. 10 OMS mendapatkan pendampingan lanjutan untuk menyusun kebijakan internal organisasi untuk perlindungan data pribadi.



Dalam dunia pers, di mana keterbukaan informasi kerap bersinggungan dengan kebutuhan akan privasi, pelatihan yang menjangkau 59 jurnalis di Jakarta dan Makassar menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 22–26%. Dari angka tersebut, 39 jurnalis menyatakan telah mengubah praktik kerja mereka,

menandakan bahwa perlindungan data pribadi kini mulai dihayati sebagai bagian dari etika jurnalisisme yang bertanggung jawab. Modul pelatihan yang kini tersedia menjadi warisan pengetahuan yang dapat diteruskan dan disesuaikan dengan kebutuhan media di berbagai daerah.



336
individu

peserta pelatihan PDP dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH)

 **22–26%**

Peningkatan pemahaman para peserta pelatihan PDP pada jurnalis terkait

- Keamanan Perangkat,
- Keamanan Komunikasi,
- Keamanan Akun, dan
- Keamanan Ponsel



menyatakan telah mengubah praktik kerja mereka terkait penerapan PDP

39 dari 59 jurnalis

Tak berhenti di sana, Yayasan Tifa bersama ELSAM memfasilitasi studi penting yang mengidentifikasi ketimpangan hukum antara regulasi pemilu dan perlindungan data pribadi—seperti benturan norma antara keterbukaan dan privasi, serta perbedaan interpretasi antara KPU dan Bawaslu. Temuan ini menjadi dasar kuat

untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi konkret kepada penyelenggara pemilu, termasuk dalam bentuk media briefing, workshop, hingga kampanye publik yang menjangkau masyarakat luas melalui infografis, podcast, opini media, dan siaran pers.



Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Jurnalis di Jakarta pada Juli 2024

Yayasan Tifa © 2024

Dengan semangat kolektif, jejaring organisasi masyarakat sipil seperti ELSAM, Perludem, PBHI, dan Themis, turut mengadvokasi isu pencatutan data KTP dalam proses dukungan calon independen pada Pilkada DKI Jakarta. Surat somasi kepada KPU menjadi penegasan bahwa pelindungan data bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata dalam menjaga integritas demokrasi.

Respons positif mulai tampak: Bawaslu, misalnya, telah menunjukkan kemauan untuk menyesuaikan standar keterbukaan informasi publik dengan prinsip-prinsip PDP dalam dokumen internal mereka. Hal ini terjadi setelah pelatihan kapasitas yang difasilitasi ELSAM pada Oktober 2024, yang diikuti dengan pelibatan ELSAM sebagai narasumber.

Inisiatif ini bukan saja tentang regulasi, melainkan juga tentang menghidupkan nilai-nilai keadilan, martabat, dan penghormatan terhadap privasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan demokratis. Di tengah derasnya arus digitalisasi yang kompleks, upaya ini mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar terletak pada kemampuan kita untuk menjaga satu sama lain—melalui kebijakan yang adil, praktik yang etis, dan solidaritas yang mengakar.

Membangun Ketahanan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Mengupayakan Bumi Tetap Lestari untuk Kita Tinggali



Air Terjun Tanggedu, Salah Satu Wilayah Adat Tanggedu, Sumba Timur

Yayasan Koppesda © 2024

Sepanjang tahun 2024, Yayasan Tifa bersama mitra-mitra lokal telah menapaki perjalanan panjang untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA berorientasi pada keadilan ekologis dan berbasis hak asasi manusia. Tifa mengangkat suara mereka yang kerap dikesampingkan—masyarakat adat, petani kecil, nelayan, dan komunitas lokal—agar lebih berdaya dalam menyuarkan hak mereka dan memastikan transparansi anggaran publik yang berpihak pada rakyat.

Salah satu momen penting terjadi di Jagongan Kemah Sosio-Ekologi di Bali, tempat di mana cerita-cerita perlawanan dan harapan bertemu. Dari Bali, Jakarta, Bandung, Banyuwangi, hingga Dieng, 174 warga dari berbagai penjuru berbagi pengalaman, belajar bersama, dan membangun jejaring solidaritas. Di antara mereka, delapan warga Jakarta Utara yang terdampak krisis air berhasil menyampaikan pengaduan resmi kepada Komnas HAM, menandai langkah penting dalam perjuangan hak atas air sebagai bagian tak terpisahkan dari hak hidup yang layak.

Kisah dari Desa Kedayakan diungkapkan lewat Peraturan Desa No. 11 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pertanian Padi Berkelanjutan, yang menghidupkan kembali praktik pertanian biointensif. Inisiatif ini menghadirkan bukan saja panen yang melimpah, tetapi juga pendapatan tambahan 15% bagi petani lokal melalui label *Beras Sehat Darim Ayu*. Pertanian pun tak lagi sekadar bertahan hidup, melainkan menjadi medium ketahanan pangan yang selaras dengan kelestarian alam.

Di Bengkulu, warga Desa Tebat Pulau dan Baru Manis mengukir jejak keberhasilan dalam memperjuangkan hak atas tanah. Dukungan melalui Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong membuka akses bagi mereka terhadap 40 hektar lahan agroekologi kopi. Di balik butiran biji kopi, tersimpan harapan tentang kehidupan yang lebih seimbang antara manusia dan alam, serta model pengelolaan SDA yang partisipatif, lestari, dan inklusif.



40 hektare lahan demonstrasi plot (demplot) kopi

berbasis agroekologi berhasil diadvokasi dan disediakan oleh pemerintah di Desa Tebat Pulau dan Baru Manis untuk pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan berbasis rakyat

30 rumah tangga meningkat kapasitasnya melalui budidaya Keramba Jaring Apung sebagai mata pencaharian alternatif di tengah dampak perubahan iklim

Dari laut di timur Indonesia, cerita tentang keramba jaring apung (KJA) di Desa Liang menjadi simbol ketahanan keluarga nelayan dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Budidaya ikan kuwe yang digarap oleh 30 rumah tangga bukan hanya memberikan penghasilan hingga Rp70.000/kg, tetapi juga menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam menjawab tantangan ekonomi dan perubahan iklim secara bersama.

Dalam upaya memperkuat perlindungan negara terhadap wilayah kelola rakyat, berbagai regulasi lokal lahir dari tangan-tangan masyarakat sendiri. Peraturan Desa Baru Manis No. 07 Tahun 2023 dan Peraturan Desa Kendayakan No. 11 Tahun 2023 menjadi payung hukum yang melindungi tanah, air, dan sumber penghidupan

FGD dan Penyusunan Lembar Survei PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) di Cerekang, Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada November 2024
Perkumpulan Wallacea © 2024



mereka. Ini adalah bukti bahwa hukum bisa tumbuh dari akar rumput, dan keadilan bisa dibangun dari desa.

Selain berbagai kerja advokasi yang terkait dengan pengembangan kapasitas masyarakat lokal terkait keterlibatan aktif dalam penyusunan dan implementasi kebijakan, kerja-kerja Tifa dalam soal sumber daya alam dan lingkungan juga ditempuh melalui dukungan terhadap pendekatan kultural dan kebudayaan. Misalnya yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka Indonesia, salah satu mitra strategis



Pertemuan Musyawarah Adat Pada Kelompok Masyarakat Adat di Kesultanan Langkat Kwala Begumit pada Agustus 2024

Yayasan Tifa © 2024

Tifa, dalam mendorong penguatan jejaring masyarakat adat budaya Melayu di Pesisir Timur Sumatera Utara, terutama untuk mempertahankan kelestarian dan perlindungan terhadap alam serta aset komunal.

Bagi Tifa, perubahan lahir dari arah mana saja yang kita upayakan. Ia tumbuh dari suara ibu-ibu petani, dari nelayan yang menambatkan perahunya setiap pagi, dari pemuda adat yang menjaga hutan, dari para pemangku masyarakat adat yang terus merawat kebudayaan dari pesisir, dan dari anak-anak yang bertanya mengapa sungai mereka tak lagi jernih. Itulah mengapa kami terus berjalan bersama mereka—karena kami percaya, ketika sumber daya alam dikelola dengan hati dan keadilan, maka bumi akan tetap hidup, dan kehidupan harus tetap lestari dan berlanjut.

Cerita–Cerita dari Pinggiran

Mereka yang Merawat dan Memimpin Perubahan



Ilustrasi Keragaman | Envato

“Seperti oase di tengah padang pasir,” demikian ungkap Mirza Jamil, koordinator proyek dari Yayasan PASKA Aceh, saat menceritakan kisah para anggota dua Rumah Belajar yang dibina dengan penuh cinta dan dukungan dari Yayasan Tifa. “Kami yang telah lama terlupakan, para korban konflik Aceh, akhirnya menemukan kembali ruang yang sudah lama hilang, ruang untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan tumbuh bersama-sama,” lanjutnya.

PASKA Aceh, sebagai organisasi pemangku hak yang mendapat hibah dari Tifa, menghadirkan Rumah Belajar Bangun Bersama dan Rumah Belajar Saban Rasa. Di sinilah para korban konflik Aceh menemukan ruang kolektif untuk tumbuh bersama. Meski fokus utama kedua rumah belajar ini adalah budidaya kacang tanah, kegiatan mereka melampaui hal itu. Mereka mengembangkan kapasitas diri melalui advokasi, mitigasi potensi konflik, dan bahkan menyentuh sisi pemulihan trauma yang tertinggal dalam ingatan.

Dua rumah belajar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertani, namun juga sebagai tempat perjumpaan komunitas, di mana kerja kolektif mengalir dalam ritme yang menguatkan. Dalam perjalanan ini, mereka tidak hanya menyemaikan benih kacang tanah, tetapi juga benih harapan, saling mendukung untuk menyembuhkan luka yang lama terkubur. “Dulu, kami takut bertemu orang baru, apalagi lembaga

luar. Tetapi program Tifa memberikan kami rasa manusiawi yang hilang. Kami merasa dihargai dan diperhatikan, dan itu membuat kami kembali bersemangat untuk bergerak bersama,” kata Mirza.

Dari tanah Papua, Yohana, staf dari Aliansi Demokrasi untuk Papua, menceritakan bagaimana program Tifa membantu memperkaya pemahamannya tentang advokasi hak asasi manusia melalui pendekatan keadilan transisi. Pendekatan ini, yang menggabungkan empat pilar utama—pengungkapan kebenaran, penuntutan, pemulihan hak korban, dan reformasi kelembagaan—memberikan wawasan baru bagi perjuangan hak-hak korban pelanggaran HAM di Papua. Yohana yang sempat belajar langsung dari rekan-rekan di Aceh, mengungkapkan bahwa perjuangan mereka tidaklah sendiri.

“ Kami yang telah lama terlupakan, para korban konflik Aceh, akhirnya menemukan kembali ruang yang sudah lama hilang, ruang untuk saling berbagi, saling menguatkan, dan tumbuh bersama-sama ”

“Karena Yayasan Tifa, saya bisa belajar langsung dari kawan-kawan di Aceh tentang advokasi Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) di sana. Bahwa ternyata kami tidak sendirian dalam perjuangan keadilan ini. Banyak cerita keberhasilan sekaligus kesedihan yang saya dapatkan. Tetapi pengalaman studi banding di Aceh sangat bermakna bagi saya dalam kerja-kerja advokasi. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya,” ungkap Yohana. Meskipun seorang Kristiani, Yohana harus mengenakan jilbab ketika bertandang ke Aceh, yang membuatnya merenungkan kehidupan keragaman iman yang tanpa tekanan dan paksaan, dan membayangkan ruang perjumpaan yang merdeka bagi mereka yang berbeda; sesuatu yang masih sulit ditempuh seutuhnya di negeri ini.

Sementara itu, di pesisir timur Sumatera Utara, tepatnya di Desa Pantai Cermin Kanan, Marjoko dari Yayasan Pusaka Indonesia menegaskan bahwa dukungan Tifa menjadi titik awal dalam perjuangan hak masyarakat adat. “Komunitas adat kami masih memiliki tantangan besar dalam memperjuangkan hak atas tanah, ekonomi, dan budaya,” katanya. Melalui program Tifa, jejaring antar masyarakat adat Melayu dari empat wilayah kesultanan—Langkat, Deli, Serdang, dan Asahan—terbentuk, memperkuat advokasi mereka atas tanah adat dan warisan budaya. “Program ini bagaikan akar pohon yang menancap kuat di tanah, menghidupkan harapan dan memperkuat daya tahan para penjaga alam,” jelas Marjoko, menyiratkan bahwa program ini menjadi fondasi yang kokoh bagi masa depan masyarakat adat di Sumatera Utara.

Bagi Panji Jafar—peserta Pelatihan Keamanan Digital bagi Pers Mahasiswa dan Jurnalisme Warga, dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Aspirasi Universitas Khairun, Ternate, pengalaman menjadi mitra Tifa sepanjang tahun 2024 digambarkannya sebagai sebuah perjalanan yang serupa dengan pohon kelapa yang tegak dan memberi manfaat, mengakar kuat dalam bumi, serta merentangkan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.

Cerita perubahan yang paling berkesan menurutnya adalah ketika ia dapat belajar tentang mitigasi dan penanganan terhadap serangan digital yang pernah menimpa rekan-rekannya di komunitas, serta membantu Jurnalisme Warga untuk lebih sadar dan paham akan pentingnya keamanan digital. Panji kemudian terpilih sebagai pelatih untuk melaksanakan Pelatihan Keamanan Digital bagi Pers Mahasiswa dan Jurnalisme Warga di Ternate. Dalam pelatihan tersebut, Panji mendengar cerita-cerita tentang kriminalisasi dan serangan digital yang pernah dialami oleh para peserta.

Makna yang paling dalam dari pengalaman ini bagi Panji adalah kesadaran bahwa sebagai penggerak dan pembela HAM, ia memikul tanggung jawab untuk terus memupuk solidaritas bersama masyarakat dan komunitas lainnya, untuk berbagi pengetahuan, memberdayakan sesama, dan terus menggedor kesadaran dan pengetahuan dirinya, dan komunitasnya, serta masyarakat sekitarnya, terkait pentingnya berjejaring dan meningkatkan kapasitas untuk melindungi diri dan terus berdaya di tengah ancaman yang terus berkembang.

Dari pengalaman mereka yang terlibat bersama Tifa, kita menyaksikan bagaimana ruang kolektif, pemberdayaan, dan kepercayaan yang diberikan kepada komunitas, bukan hanya mengubah cara mereka bertani atau berorganisasi, tetapi juga menghidupkan kembali semangat kolektivitas dan solidaritas yang telah lama terpinggirkan. Tifa, dengan segala dukungannya, menanamkan benih-benih perubahan yang tumbuh menjadi pohon harapan bagi mereka yang pernah terluka, menghadirkan keadilan yang merangkul, dan memberi ruang bagi setiap individu untuk berdaya dengan segala kapasitasnya.

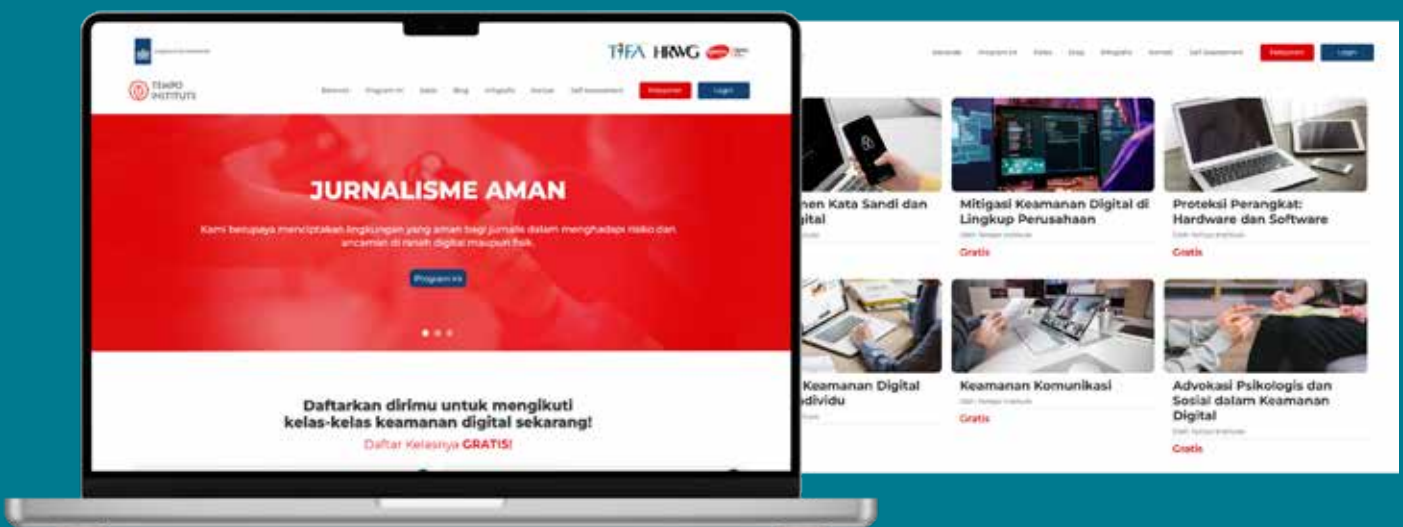
Ilustrasi Masyarakat | Envato



Bicara Karya

Sepanjang tahun 2024, setidaknya 48 Produksi pengetahuan yang berupa risalah kebijakan, modul, siaran pers, riset, publikasi, dan portal dan sebagainya dihasilkan, baik oleh Mitra yang didukung Yayasan Tifa, maupun oleh Tifa secara langsung. Kami merangkum produksi pengetahuan yang bisa diakses dan dibaca secara publik, dan merupakan ruang pengetahuan penting untuk dibagikan:

JurnalismeAman.com



Portal pengetahuan penting yang bisa diakses secara bebas oleh publik, menjadi ruang virtual yang memberikan akses bagi masyarakat terhadap berbagai edukasi, infografis, layanan self-assessment, modul pelatihan, bahkan hingga kelas-kelas gratis terkait Keamanan Digital, Keamanan Komunikasi, Advokasi Psikologis dalam Keamanan Digital, Perilaku Aman di Dunia Digital dan Media Sosial, dan Manajemen Kata Sandi dan Data Digital.



Kerja sama antara Tempo Institute, Yayasan Tifa, Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)

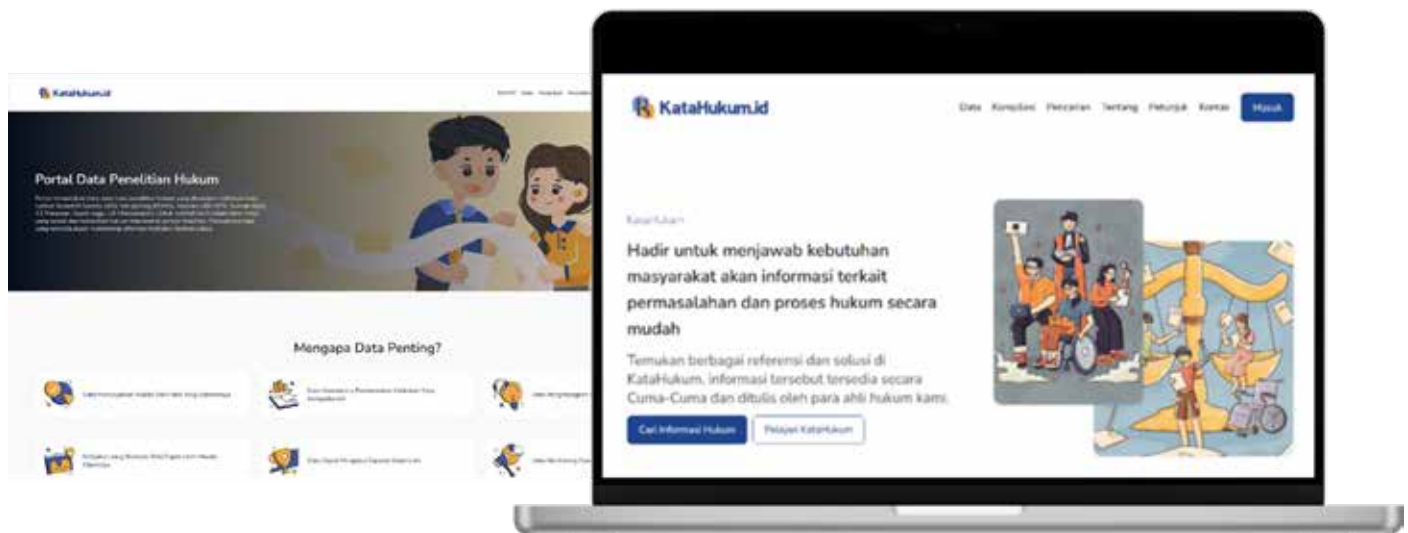
Tautan: <https://jurnalismeaman.com>

KataHukum.id

Portal informasi yang dikembangkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan jejaringnya, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan terkait bantuan hukum dan literasi hukum secara inklusif.



Tautan: <https://katahukum.id>



Indeks Keselamatan Jurnalis 2023



Diluncurkan pada Mei 2024, Indeks Keselamatan Jurnalis 2023 merupakan studi berbasis survei terhadap 536 jurnalis. Laporan ini menunjukkan bahwa keselamatan jurnalis di Indonesia masih belum sepenuhnya terjamin. Skor indeks berada di angka 59,8 dari 100, yang dikategorikan sebagai “Agak Terlindungi.” Skor ini dipengaruhi oleh tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis, berdasarkan hasil survei terhadap 536 jurnalis serta data kasus yang ditangani Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sepanjang tahun 2023.

Penerbit: Yayasan Tifa, Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), didukung oleh lembaga riset Populix.



Tautan: <https://www.tifafoundation.id/buku/laporan-indeks-keselamatan-jurnalis-2023/>

Indeks Keselamatan Jurnalis 2024

Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis 2024, hasil kerja sama Yayasan Tifa dan Populix, mengukur tingkat perlindungan terhadap jurnalis di Indonesia melalui tiga pilar utama: Individu Jurnalis, Stakeholder Media, serta Peran Negara dan Regulasi. Dengan menggunakan metode survei terhadap 760 jurnalis serta analisis data

sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keselamatan jurnalis di Indonesia.

Penerbit: Yayasan Tifa, Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), didukung oleh lembaga riset Populix.



Tautan: <https://www.tifafoundation.id/buku/laporan-indeks-buku/laporan-indeks-keselamatan-jurnalis-2024/>

Modul Pelindungan Data Pribadi dalam Jurnalisme dan Media



Modul pelatihan tentang Pelindungan Data Pribadi ini dirancang khusus untuk pemangku kepentingan dalam industri media digital. Modul pelatihan ini disusun secara kolaboratif oleh Yayasan Tifa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi). Modul ini telah menjadi basis pelatihan pelindungan data pribadi untuk jurnalis dan perusahaan media yang diselenggarakan oleh Tifa dan organisasi mitra.

Penerbit: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)



Tautan: <https://www.tifafoundation.id/buku/modul-pelindungan-data-pribadi-dalam-jurnalisme-dan-media/>

Modul “Netizen juga Citizen: Menyemarakkan Aktivisme Digital”

Di tengah penyempitan ruang-ruang sipil, gerakan sosial, termasuk lewat aktivisme digital, perlu diperluas. Perluasan yang dimaksud adalah memastikan semakin



banyaknya kelompok masyarakat sipil yang dapat menggunakan aktivisme digital dengan optimal dan aman serta semakin beragamnya repertoar/metode aktivisme digital yang dimanfaatkan. Bertolak dari kebutuhan tersebut, Yayasan Tifa bekerja sama dengan Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM), mengembangkan modul “Netizen Juga Manusia Citizen: Menyemarakkan Aktivisme Digital.” Menggunakan modul tersebut, kedua lembaga lalu menyelenggarakan rangkaian pelatihan luring dan daring untuk 100 organisasi masyarakat sipil (OMS) dari seluruh Indonesia pada Agustus sampai Oktober 2023.

Kelas online “Netizen Juga Citizen: Menyemarakkan Aktivisme Digital” ini hadir agar pembaca dapat memikirkan lebih dalam di mana (dan mau ke mana) ia dalam peta aktivisme digital, apa sejatinya dan arti penting aktivisme digital, bagaimana memperluas repertoar dan meningkatkan intensitas aktivisme digital, bagaimana melakukan aktivisme digital secara aman, serta bagaimana melembagakannya. Harapannya, terbukanya akses modul ini akan membantu mendampingi organisasi masyarakat sipil maupun individu dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan.



Kelas daring ini merupakan buah kerjasama dari Yayasan Tifa, IIS UGM, dan British Council.

Tautan: <https://focusugm.id/explore/aktivisme-digital-Isutm>

Panduan Memahami perlindungan Data Pribadi dalam Pemilu

Seiring meningkatnya ancaman terhadap integritas data pribadi di Indonesia akibat keteledoran pengendali, buku ini berusaha memberikan sumbangsuhnya untuk penguatan kapasitas masyarakat untuk memahami hak-haknya. Buku ini sengaja dikemas dalam bahasa awam supaya masalah perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami orang-orang hukum. Saat ditulis, UU PDP



belum genap berusia dua tahun, sehingga masa transisi tersebut perlu diisi dengan kerja-kerja penguatan akar rumput supaya advokasi PDP makin relevan untuk lebih banyak sektor.



Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Tautan: <https://www.elsam.or.id/buku/panduan-memahami-pelindungan-data-pribadi-dalam-pemilu>

Kebebasan atau Kebencian?

Laporan Akuntabilitas Platform Media Sosial dalam Penyebaran Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024

Laporan ini membahas isu-isu kritis terkait ujaran kebencian di media sosial, terutama dalam konteks pemilu di Indonesia, serta peran penting akuntabilitas platform media sosial dalam menjaga kualitas dan keamanan konten. Akuntabilitas platform media sosial merupakan isu krusial yang memengaruhi efektivitas moderasi konten, terutama dalam menangani ujaran kebencian.

Di era digital, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok telah menjadi arena utama bagi diskursus publik, memengaruhi dinamika politik, sosial, dan budaya secara global.

Dengan penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 79,5% pada tahun 2024, akses ke media sosial telah meluas, tetapi hal ini juga membawa tantangan serius, khususnya terkait dengan akuntabilitas platform dalam moderasi konten. Platform-platform ini sering kali menghadapi kritik terkait kurangnya transparansi dalam kebijakan moderasi konten, efektivitas algoritma, dan responsivitas terhadap pengaduan. Ketidakjelasan dalam kebijakan, kesalahan deteksi oleh algoritma, serta kurangnya transparansi dan aksesibilitas mekanisme pengaduan menjadi masalah signifikan yang menghambat penanganan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, termasuk individu LGBTIQ+, perempuan, masyarakat adat, etnis Tionghoa, pengikut Syiah dan Ahmadiyah, serta kelompok disabilitas.



Penerbit: SAFENet

Tautan: <https://safenet.or.id/id/2024/08/akuntabilitas-platform-media-sosial-dalam-penyebaran-ujaran-kebencian/>

Bersuara dari Layar Media Sosial

23,128
SahabaTifa

Jumlah Pengikut Akun Resmi
Yayasan Tifa per Agustus 2025



@tifafoundation_id 9,573

Yayasan Tifa 1,711

@TifaFoundation 6 Baru!

Tifa Foundation 5,103

@TifaFoundation 3,324

Tifa Foundation 3,411

Di tengah lanskap perjuangan hari ini, kampanye dibutuhkan bukan saja sebagai seruan, tetapi juga ruang tempat masyarakat menenun dan berbagi kisah-kisah kolektif yang menyentuh nalar dan nurani, melintasi batas ruang dan waktu, dan berakar pada pengalaman komunitas yang paling mendalam. Ia membutuhkan integrasi yang cermat dan canggih—sebuah orkestra strategi narasi yang memanfaatkan ruang digital bukan hanya sebagai panggung, tetapi juga sebagai ruang hidup, tempat solidaritas bertumbuh dan suara-suara diteguhkan.

Yayasan Tifa, sebagai bagian dari denyut komunitas masyarakat sipil yang terus bergerak, tidak pernah

berhenti menajamkan kepekaan dan melantangkan suaranya. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia terus mengasah keterampilannya dalam menyuarakan keadilan, merawat narasi-narasi perubahan melalui media sosial—dengan gema yang berakar pada empati, keberanian, dan harapan. Suaranya bukan hanya miliknya, melainkan juga dari mereka yang kerap tak terdengar—dari akar rumput, dari lorong-lorong sunyi perjuangan, dari wajah-wajah yang memimpikan keadilan.

Dan dari sana, kampanye tumbuh bukan sebagai instruksi, tetapi sebagai undangan: untuk melihat, mendengar, dan membangun solidaritas bersama.



Metamorfosa Tifa

Menyulam Kemandirian untuk Ketangguhan yang Berkelanjutan

Sebagai lembaga yang kini mandiri dan berdikari, **Yayasan Tifa** terus menunjukkan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan yang berintegritas, akuntabel, dan tumbuh lebih profesional. Sejak awal tahun 2024, Yayasan Tifa telah mencatat sejumlah pencapaian penting yang menjadi landasan bagi langkah-langkah kedepan yang lebih besar.

Salah satu kemajuan signifikan adalah pengelolaan Endowment Fund yang semakin kuat. Dengan penyusunan SOP pengelolaan dana yang disetujui, Tifa kini memiliki landasan yang kokoh dalam mengelola investasi. Pembukaan rekening investasi baru di Bank CTBC menggantikan rencana untuk menyewa manajer investasi, memberi fleksibilitas lebih dalam pengelolaan aset. Meskipun tantangan dalam menemukan sumber dana baru untuk *endowment* dan tabungan tetap ada, return investasi yang tercatat hingga Oktober 2024 mencapai Rp632,8 juta, memperlihatkan hasil yang positif dari keputusan strategis yang diambil.

Selain itu, Tifa juga memperkuat tata kelola internal organisasi. Perubahan SOP Finance, pelatihan intensif bagi tim keuangan, serta perbaikan infrastruktur kantor semakin mendukung kelancaran operasional. Dengan berbagai fasilitas baru yang mendukung kenyamanan staf, Tifa menciptakan ruang yang lebih efisien untuk tumbuh bersama. Meskipun ada tantangan dalam mengelola data dan memperkuat sistem IT, langkah-langkah yang diambil menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki tata kelola internal.

Dalam aspek kepengurusan, Tifa berhasil mengadakan rapat tahunan dengan pengurus, pembina, dan pengawas yang membahas proyeksi strategis lima tahun ke depan. Proses pembaruan struktur organisasi yang melibatkan revisi akta yayasan, memberikan ruang bagi Tifa untuk menata ulang pos-pos penting di level manajemen, memastikan setiap langkah sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Tifa juga terus mendorong ruang berbagi pengetahuan yang lebih intensif, baik secara internal maupun dengan mitra. Meskipun beberapa inisiatif baru saja dimulai, langkah ini menjadi upaya penting untuk membangun budaya berbagi



pengetahuan yang lebih konsisten. Begitu pula dengan penguatan sistem komunikasi dan advokasi, di mana Tifa berhasil memproduksi ratusan konten untuk media sosial, memperluas dampak advokasi, dan meningkatkan transparansi melalui laporan tahunan yang diterbitkan.

Di sisi lain, pengelolaan dana hibah juga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan perbaikan sistem dan pencapaian dalam menutup hampir seluruh hibah yang *outstanding*. Keberhasilan dalam melaksanakan audit proyek dengan hasil positif membuktikan komitmen Tifa terhadap tata kelola yang baik.

Sampul-Sampul Laporan Tahunan Yayasan Tifa sejak 2015 hingga 2024
Yayasan Tifa © 2015–2024



Di tengah situasi geopolitik global yang mempengaruhi arus dukungan internasional terhadap kerja-kerja aktivisme dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, juga di wilayah Utara Global pada umumnya, yang ditandai menguatnya gerakan anti-HAM dan anti-gender, hal ini menjadi tantangan sekaligus tuntutan tersendiri bagi organisasi dan lembaga HAM untuk meningkatkan daya lentingnya, mengokohkan resiliensinya, dengan tata kelola organisasi yang lebih terstruktur, mandiri, dan berkelanjutan.

Meskipun ada tantangan yang harus terus dihadapi, perjalanan Yayasan Tifa sepanjang 2024 menunjukkan arah yang jelas menuju peningkatan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, lebih transparan, dan lebih profesional. Langkah-langkah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa Tifa tetap mampu memainkan peran vitalnya dalam mendukung isu-isu strategis dan memberdayakan masyarakat sipil di Indonesia.

Laporan Keuangan

Diaudit oleh Auditor Independen — PKF (Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan)

Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2024

Disajikan dalam ribuan Rupiah dan US Dollar

	2024 IDR	2024 USD	2023 IDR	2023 USD
ASET	60,742,786	3,758,371	68,063,911	4,415,181
ASET LANCAR	51,920,447	3,212,502	58,542,251	3,797,500
Cash dan Bank	23,282,910	1,440,595	35,686,535	2,314,902
Piutang dari Donor	2,823,164	174,680	6,060,730	393,145
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	930,394	57,567	1,163,047	75,445
Endowment Funds	24,883,979	1,539,660	15,631,939	1,014,008
ASET TETAP	8,822,339	545,869	9,521,660	617,681
Aset Tetap	8,822,339	545,869	9,521,660	617,681
LIABILITAS DAN ASET NETO	60,742,786	3,758,371	68,063,911	4,415,181
LIABILITAS JK PENDEK	28,554,104	1,766,745	37,414,033	2,426,962
Utang Hibah	5,782,393	357,777	10,116,644	656,243
Pendapatan Ditanggunghkan	22,120,944	1,368,702	26,587,577	1,724,674
Biaya yang masih harus dibayar	243,374	15,058	233,428	15,142
Kompensasi	383,682	23,740	350,680	22,748
Utang pajak	23,711	1,468	125,704	8,155
ASET NETO	32,188,682	1,991,626	30,649,878	1,988,219
Tanpa pembatasan	13,597,855	892,765	13,769,350	903,582
Dengan pembatasan	18,590,827	1,277,991	16,880,528	1,170,109
Selisih translasi	-	(179,130)	-	(85,472)

Laporan Aktivitas

31 Desember 2024

(Disajikan dalam ribuan Rupiah dan US Dollar)

	2024						2023					
	Tanpa Pembatasan		Dengan Pembatasan		Total	IDR	Tanpa Pembatasan		Dengan Pembatasan		Total	IDR
	IDR	USD	IDR	USD			IDR	USD	IDR	USD		
SURPLUS (DEFISIT)	(15,977,299)	(1,007,803)	17,516,100	1,104,868	1,538,801	97,065	(25,476,414)	(1,671,790)	39,818,989	2,612,967	14,342,575	941,177
PENERIMAAN	1,866,641	117,744	17,516,100	1,104,868	19,382,741	1,222,612	931,615	61,134	39,818,989	2,612,967	40,750,604	2,674,101
Pendapatan hibah	237,664	14,992	16,875,436	1,064,457	17,113,100	1,079,449	-	-	39,085,437	2,564,830	39,085,437	2,564,830
Pendapatan lain-lain	1,628,977	102,752	640,664	40,411	2,269,641	143,163	931,615	61,134	733,552	48,137	1,665,167	109,271
BEBAN	17,843,940	1,125,547	-	-	17,843,940	1,125,547	26,408,029	1,732,924	-	-	26,408,029	1,732,924
Biaya hibah	3,571,443	225,277	-	-	3,571,443	225,277	8,880,662	582,759	-	-	8,880,662	582,759
Biaya kegiatan	2,916,579	183,969	-	-	2,916,579	183,969	3,532,197	231,785	-	-	3,532,197	231,785
Biaya perjalanan dinas	1,768,379	111,544	-	-	1,768,379	111,544	2,331,602	153,003	-	-	2,331,602	153,003
Biaya staf	7,400,270	466,788	-	-	7,400,270	466,788	7,983,450	523,884	-	-	7,983,450	523,884
Biaya operasional	1,964,646	123,925	-	-	1,964,646	123,925	3,247,952	213,134	-	-	3,247,952	213,134
Biaya lain-lain	222,623	14,044	-	-	222,623	14,044	432,166	28,359	-	-	432,166	28,359



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
DECREE OF THE FINANCE MINISTER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 855/VM.1/2017

UOB Plaza 42nd & 30th Floor
Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 Indonesia

+62 21 29932121 (Hunting)
+62 21 3144003
jkt-office@pkfhadiwinata.com
www.pkfhadiwinata.com

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. : 01627/2.1133/AU.1/11/1822-1/1/VI/2025

Trustees, Management and Supervisors

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan TIFA ("the Foundation"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, the statement of comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including information relating to material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Foundation as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Foundation in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matters

The financial statements of the Foundation as at December 31, 2023 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as at December 31, 2024 and for the year then ended, were audited by other independent auditors, according to the report number: 00800/2.0459/AU.1/11/0672-3/1/V/2024 dated May 28, 2024 who expressed an unmodified opinion on the financial statements.

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The translation of the statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of cash flows, and notes to the financial statements to United States Dollar is presented for convenience of readers based on the basis set out in Note 3 and is not a required part of the basic financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such translation has been subjected to our auditing procedures and, in our opinion, has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis set out in Note 3.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (continued)

No. : 01627/2.1133/AU.1/11/1822-1/1/VI/2025 (continued)

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Foundation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Foundation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Foundation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Foundation's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (continued)

No. : 01627/2.1133/AU.1/11/1822-1/1/VI/2025 (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Foundation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Foundation to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Maria Anna Retno Kurniasari, S.E., CPA., Asean CPA
Public Accountant Registration No. AP.1822



June 30, 2025

Glosarium

ADD	Alokasi Dana Desa: Dana dari APBD kabupaten/kota yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa
Adminduk	Administrasi Kependudukan: Proses pencatatan data kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk yang dikelola oleh instansi berwenang untuk keperluan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan
Agroekologi	Pendekatan pertanian yang menggabungkan prinsip ekologi dan pengetahuan lokal untuk menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan
AI	Artificial Intelligence, Akal Imitasi, atau kecerdasan buatan. Sistem buatan yang dirancang untuk meniru cara berpikir, belajar, dan bertindak manusia dengan menggunakan algoritma dan data
AIDP	Aliansi Demokrasi untuk Papua. Organisasi masyarakat sipil independen yang berfokus pada advokasi demokrasi, penegakan keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua.
AJAR	Asia Justice and Rights. Organisasi non-profit yang berfokus pada penguatan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kawasan Asia-Pasifik
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations: Organisasi regional negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial-budaya antar anggotanya
ASPPUK	Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil
BRA	Badan Reintegrasi Aceh. Lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola proses reintegrasi perdamaian pasca-konflik di Aceh
DBH-SDA	Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara atas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut
EHRD	Environmental Human Rights Defender, Pembela HAM dan Lingkungan. Individu atau kelompok yang secara aktif memperjuangkan perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia yang terkait dengan akses, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Organisasi HAM independen yang fokus pada produksi pengetahuan, advokasi kebijakan, litigasi strategis, dan pendidikan HAM, khususnya terkait isu kebebasan sipil, bisnis dan HAM, teknologi, dan keadilan transisional
FGD	Focus Group Discussion. metode diskusi terarah yang melibatkan sekelompok kecil peserta untuk menggali pandangan, pengalaman, dan opini mereka terhadap suatu isu, kebijakan, atau program tertentu
FRF	Dana Fleksibel-Responsif (Flexible-Responsive Fund) yang terdiri dari Dana Responsif (Dana Darurat dan Dana Tindak Lanjut), dan Dana Pengembangan kapasitas untuk menyediakan perlindungan bagi pembela HAM dan Lingkungan yang mendapatkan ancaman dan kriminalisasi

IJRS	Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Lembaga non-pemerintah yang berkomitmen untuk menawarkan solusi, melakukan advokasi dan memberikan edukasi berbasis bukti melalui riset kepada masyarakat serta pemangku kepentingan
Interseksional	Pendekatan yang memahami bagaimana berbagai identitas sosial dan kategori seperti gender, ras, kelas, orientasi seksual, disabilitas, agama, dan lainnya saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap pengalaman diskriminasi atau ketertindasan.
ISRH	Integral Security Resources Hub, atau Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (lihat JPLKI)
JETP	Just Energy Transition Partnership. Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan. Mekanisme kerja sama internasional untuk transisi energi yang adil dan inklusif. JETP bertujuan untuk mempercepat peralihan dari energi fosil ke sumber energi terbarukan sambil memastikan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat yang terdampak
JPLKI	Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral . Sebuah jaringan beranggotakan lembaga/organisasi yang menyediakan perlindungan keamanan dan keselamatan bagi pembela HAM & Lingkungan di Indonesia
Kelompok Rentan	Sekelompok orang yang memiliki kerentanan dan keterbatasan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk kelompok seperti lanjut usia, anak-anak, perempuan hamil, orang dengan disabilitas, serta populasi yang hidup dalam kemiskinan tanpa akses ke kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, air, dan sanitasi. Mereka kerap berada dalam risiko yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan diskriminasi pada berbagai aspek kehidupan
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab dalam bidang hukum dan hak asasi manusia
KKJ	Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). Inisiatif yang dibentuk di Banda Aceh untuk melindungi jurnalis dari kekerasan dan ancaman saat menjalankan tugas jurnalistik
KKPK	Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran. aliansi berbagai organisasi dan individu yang bekerja untuk menegakkan HAM dan mendorong pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM berat
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Lembaga yang dibentuk untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran HAM dan melakukan penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia).
Komnas HAM	Lembaga negara mandiri yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM)
KOPPESDA	Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (KOPPESDA). Lembaga nirlaba independen yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis masyarakat secara partisipatif di kawasan Nusa Tenggara
LBH	Organisasi yang memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, fokus pada pendampingan, advokasi, dan edukasi hukum untuk menangani ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia

MOOC	Massive Open Online Course. Kelas daring atau online yang berisi panduan serta studi kasus untuk merefleksikan, melakukan, dan melembagakan aktivisme digital
OGP	Open Government Partnership. Kemitraan Pemerintah Terbuka. Sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, partisipatif, dan akuntabel
Otoritarianisme	Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok yang memiliki kontrol penuh atas negara, tanpa adanya pembatasan yang signifikan dari hukum atau lembaga-lembaga demokratis
PBHI	Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi dengan basis anggota untuk penanganan kasus, pendampingan dan pembelaan korban pelanggaran hak asasi manusia, pemberdayaan komunitas korban, penelitian dan pengembangan HAM maupun advokasi kebijakan
Pemangku Hak	Individu, organisasi, atau kelompok yang secara etik dan moral memiliki hak untuk terlibat atau secara aktif dilibatkan dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan dan/atau menentukan hidup mereka.
PNAI	Policy Network on Artificial Intelligence. Inisiatif dari Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum/IGF) yang bertujuan untuk membahas isu-isu kebijakan terkait akal imitas (AI) dan tata kelola data secara global
Policy Paper	Dokumen analisis masalah kebijakan tertentu, serta menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan. Biasanya disusun oleh para ahli, lembaga penelitian, atau kelompok advokasi, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik
PRISMA	Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Aplikasi untuk membantu perusahaan melakukan penilaian mandiri terhadap risiko bisnis dan HAM.
RAD-SPM	Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal. Dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di suatu daerah
RAN-OGI	Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia. Dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di Indonesia
Stakeholder	Pemangku kepentingan. Pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) baik individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki hubungan dengan organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat
UN-IGF	United Nations' Internet Governance Forum. Forum Tata Kelola Internet PBB (Internet Governance Forum/IGF). Forum yang bertujuan untuk memfasilitasi dialog kebijakan publik mengenai isu-isu tata kelola internet

LAPORAN TAHUNAN YAYASAN TIFA 2024

Tumbuh, Tangguh, Berdaya

Yayasan Tifa © 2024



Penyusun & Penerbit:
Yayasan Tifa — Jakarta, Indonesia

Penulis:
Amar Alfikar

Penyunting:
Tim Redaksi Yayasan Tifa

Kecuali dinyatakan lain, seluruh gambar berasal dari lisensi resmi, Creative Commons, atau dokumentasi © Yayasan Tifa.

Penata Letak:
Communication & Campaign Officer Yayasan Tifa